



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 (13 November – 5 Desember 2024)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI II	4
A. FUNGSI LEGISLASI	4
B. FUNGSI ANGGARAN	4
C. FUNGSI PENGAWASAN	4
KOMISI III	8
A. FUNGSI LEGISLASI	8
B. FUNGSI ANGGARAN	9
C. FUNGSI PENGAWASAN	9
D. TUGAS KHUSUS	14
KOMISI IV	18
A. FUNGSI LEGISLASI	18
B. FUNGSI ANGGARAN	18
C. FUNGSI PENGAWASAN	18

KOMISI V	20
A. FUNGSI LEGISLASI	20
B. FUNGSI ANGGARAN	20
C. FUNGSI PENGAWASAN	20
KOMISI VI	22
A. FUNGSI LEGISLASI	22
B. FUNGSI ANGGARAN	22
C. FUNGSI PENGAWASAN	22
KOMISI VII	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	24
C. FUNGSI PENGAWASAN	33
KOMISI VIII	35
A. FUNGSI LEGISLASI	35
B. FUNGSI ANGGARAN	35
C. FUNGSI PENGAWASAN	37
KOMISI IX	45
A. FUNGSI LEGISLASI	45

B. FUNGSI ANGGARAN	45
C. FUNGSI PENGAWASAN	45
KOMISI X	49
A. FUNGSI LEGISLASI	49
B. FUNGSI ANGGARAN	49
C. FUNGSI PENGAWASAN	50
KOMISI XI	58
A. FUNGSI LEGISLASI	58
B. FUNGSI ANGGARAN	58
C. FUNGSI PENGAWASAN	65
KOMISI XII	75
A. FUNGSI LEGISLASI	75
B. FUNGSI ANGGARAN	75
C. FUNGSI PENGAWASAN	75
KOMISI XIII	81
A. FUNGSI LEGISLASI	81
B. FUNGSI ANGGARAN	81
C. FUNGSI PENGAWASAN	81

BADAN LEGISLASI	82
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	85
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	98
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	101
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	103
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	108

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN /LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Lemhannas	RDP Komisi I DPR RI dilaksanakan pada 13 November 2024.	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Program 100 hari kerja Lemhannas;2. Kajian strategik Lemhannas terkait dinamika geopolitik nasional, regional, dan internasional;3. Situasi dan kondisi ketahanan nasional RI jelang pelaksanaan Pilkada serentak November 2024.	
2.	Wantannas	RDP Komisi I DPR RI dilaksanakan pada 14 November 2024.	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Program 100 hari kerja Wantannas;2. Kajian strategik Wantannas terkait dinamika geopolitik nasional, regional, dan internasional;3. Situasi dan kondisi ketahanan nasional RI jelang pelaksanaan Pilkada serentak November 2024.	
3.	KPI, Dewan Pers, dan KIP Pusat	RDP Komisi I DPR RI dilaksanakan pada 18 November 2024.	<ol style="list-style-type: none">1. Peran KPI dalam Pengawasan Penyiaran Pemilu Pilkada;2. Peran Dewan Pers dalam Penyelesaian Pengaduan Pemberitaan Terkait Pilkada;3. Peran Komisi Informasi Pusat dalam Pengawasan implementasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pilkada.	

NO	KEMENTERIAN /LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kemenlu	<i>Courtesy Call</i> dilaksanakan pada 18 November 2024.	Menerima Kunjungan Kehormatan dengan Delegasi Dubes Jepang.	
5.	Kemenlu	<i>Courtesy Call</i> dilaksanakan pada 19 November 2024.	Menerima Kunjungan Kehormatan dengan Delegasi Korea Selatan.	
6.	Kemenlu	<i>Courtesy Call</i> 20 November 2024	<i>Courtesy Call.</i>	
7.	Kemenhan/TNI	Kunspek Komisi Badan Usaha Milik Negara/Swasta : Alutsista	Komisi I DPR RI tanggal 21 - 23 November 2024 melaksanakan Kunjungan Spesifik ke : 1. Provinsi Jawa Barat dalam rangka "Percepatan kemandirian dan modernisasi alutsista TNI dengan produk unggulan" oleh PT Pindad; 2. Provinsi Banten dalam rangka "Pengembangan dan inovasi kendaraan taktis nasional serta peningkatan kemandirian alutsista melalui optimalisasi produksi" oleh PT SSE (PT Sentra Surya Ekajaya); 3. Provinsi Jawa Timur dalam rangka "Penguatan industri pertahanan maritim nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan kapal militer " oleh PT. Lundin <i>Industry Invest.</i>	
8.	Kemhan	Raker Komisi	1. Rencana Progtam 100 hari kerja Menhan; 2. Kesiapan pilkada serentak.	
9.	Kemlu	<i>Courtesy Call</i> dilaksanakan pada Kamis, 28 November 2024.	Menerima Kunjungan Kehormatan dengan Delegasi Australia Selatan.	

NO	KEMENTERIAN /LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	Kemhan	Kunspek Komisi PT DI dan Korem dilaksanakan pada 29 November – 1 Desember 2024.	Komisi I DPR RI tanggal 29 November – 1 Desember 2024 melaksanakan Kunjungan Spesifik dengan tema: 1. Kesiapan Korem 052c/Wijayakrama dalam Menciptakan Kondisi Wilayah yang Tangguh terhadap berbagai Kerawanan dan Potensi Ancaman, termasuk pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Banten; 2. Percepatan Kemadirian dan Modernisasi Alutsista TNI dengan Produk Unggulan.	
10.	Komdigi	Kunspek Komisi ke PDN dilaksanakan pada 29 November – 1 Desember 2024.	Progres Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan Upaya Meminimalkan Kebocoran Data.	
11.	Kemlu	Raker Komisi I DPR RI dilaksanakan pada Senin, 2 Desember 2024.	1. Rencana Program hari kerja Menlu; dan 2. Isu-isu Aktual.	
12.	BIN	Intern Komisi I DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 3 Desember 2024.	Pengambilan Sumpah Tim Pengawas Intelijen Komisi I DPR RI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 2. Lembaga Administrasi Negara 3. Badan Kepegawaian Negara 4. Arsip Nasional Ri 5. Ombudsman Ri	Raker dan RDP dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, ANRI dan Ombudmman RI;- Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB dalam 100 Hari Kabinet Merah Putihp- Dan lain lain .	
2.	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri	Rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian ATR/BPN.- Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih.- Dan lain lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)	Rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Otorita Ibukota Nusantara (OIKN); - Membicarakan Progres Pembangunan IKN; - Dan lain lain. 	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 	Raker dan rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 31 oktober 2024 pukul 10.00 WIB.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) - Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih. - Dan lain lain. 	
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum 2. Badan Pengawas Pemilu 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 	Rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024.	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Jajaran KPU, BAWASLU dan DKPP; - Membicarakan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024; - Dan lain lain. 	
6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabat Gubernur Sumatera Utara. 2. Ketua KPU Provinsi Sumut 3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumut; 4. Gakkumdu Provinsi Sumut; 5. Bupati Dan Walikota Provinsi Sumut; 6. Perwakilan Kemendagri 7. Perwakilan KPU Bawaslu Pusat 	Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 November 2024.	Terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. 2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. Bupati Dan Walikota Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Perwakilan Kemendagri 7. Perwakilan KPU Bawaslu Pusat 	Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 November 2024.	Terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara.	
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur. 2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur 3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur; 4. Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur; 5. Bupati Dan Walikota Provinsi Kalimantan Timur; 6. Perwakilan Kemendagri; 7. Perwakilan KPU Bawaslu Pusat; 8. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 	Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 November 2024.	Terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di IKN, Provinsi Kalimantan Timur.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Penjabat Gubernur Daerah Jakarta 3. Penjabat Gubenur Banten, Bupati/Walikota Se Provinsi Banten; 4. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Penjabat Bupati/Walikota Se Provinsi Jawa Barat; 5. Penjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati/Walikota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Raker dan rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 pukul 10.00 WIB.	Membahas Pesiapan dan Kesiapan Pemilihan Kepala Daeah Serentak Tahun 2024.	
10.	1. Menteri Dalam Negeri; 2. Penjabat Gubernur Jawa Tengah; 3. Bupati/Walikota Se Provinsi Jawa Tengah	Rapat kerja dan rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024 pukul 14.00 WIB.	Membahas Pesiapan dan Kesiapan Pemilihan Kepala Daeah Serentak Tahun 2024.	
11.	1. Menteri Dalam Negeri; 2. Penjabat Gubernur Jawa Timur; 3. Bupati/Walikota Se Provinsi Jawa Timur.	Rapat kerja dan rapat dengar pendapat dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 pukul 14.00 WIB.	Membahas Pesiapan dan Kesiapan Pemilihan Kepala Daeah Serentak Tahun 2024.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.	<p>Menindaklanjuti Surat Komisi III DPR RI yang ditujukan kepada Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Nomor B/75-DW/KOM.III/MP.I/11/2024 tertanggal 6 November 2024 perihal Penyusunan NA & RUU, maka pada tanggal 2 Desember 2024 Komisi III DPR RI melaksanakan rapat dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, guna membahas penyusunan draf RKUHAP.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI dapat berkolaborasi aktif dengan Komisi III DPR dalam pengayaan materi, termasuk dalam mendapatkan bahan masukan dari berbagai pihak.2. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI dapat berkolaborasi untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan hukum acara pidana yang masih perlu untuk diatur secara lebih jelas atau bahkan pengaturan baru terhadap hal yang belum pernah diatur sebelumnya.3. Komisi III DPR dan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI akan terus berkoordinasi dalam rangka mengidentifikasi beberapa pengaturan yang berpotensi menimbulkan perdebatan pada saat pembahasan, sehingga membutuhkan kajian yang lebih mendalam.4. Komisi III DPR akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasa perlu untuk mendapatkan berbagai masukan untuk menyempurnakan Draf RUU KUHAP bersama Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI.	Penyusunan.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung 2. Wakil Jaksa Agung 3. Jaksa Agung Muda di lingkungan Kejaksaan Agung 4. Kepala Badan di lingkungan Kejaksaan Agung 5. Kepala kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia 	<p>Raker Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dan seluruh jajaran dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024, membahas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Grand strategy</i> dari rencana strategis Jaksa Agung pada Periode 2024-2029. 2. Penanganan kasus aktual yang menarik perhatian publik. 3. Mekanisme evaluasi & renja terkait tata kelola pembinaan karir. 4. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi kejaksaan. 	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung Kejaksaan Agung untuk mewujudkan rencana strategis Kejaksaan 2025-2029 demi terwujudnya penegakan hukum yang bersih, humanis, akuntabel, transparan dan modern dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. 2. Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung untuk terus meningkatkan kualitas penanganan perkara dengan menerapkan prinsip kemandirian, transparan, dan berkeadilan serta memastikan penegakan hukum yang dilakukan mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian keuangan negara. 3. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk mengevaluasi dan mengatur pengelolaan struktur organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara lebih objektif dan terukur, khususnya dalam hal sistem penempatan Jaksa yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi sehingga mendukung responsivitas dan akuntabilitas kinerja. 4. Komisi III DPR RI mendukung upaya Jaksa Agung terkait proses penegakan hukum melalui pendekatan Keadilan Restoratif dengan selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas perkara. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kepolisian Daerah 2. Kepala Kejaksaan Tinggi 3. Kepala BNN Provinsi 	<p>Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengawasan penegakan hukum pada sektor Kamtibmas, sektor sumber daya alam dan perjudian dilaksanakan pada 14-18 November 2024.</p>	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 14-16 November 2024; 2. Provinsi Sumatera Utara, tanggal 15-17 November 2024; dan 3. Provinsi Jawa Barat, tanggal 16-18 November 2024. 	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa Hukum Keluarga Alm. Dr. Aulia Risma Lestari; 2. Sdr. Agus Warmon dan Kuasa Hukumnya 	<p>RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024.</p>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Jawa Tengah untuk segera menuntaskan penyidikan dan penetapan tersangka terkait meninggalnya Almh. Aulia Risma Lestari dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/123/IX/2024/JATENG/SPKT/POLDA JAWA TENGAH secara menyeluruh, transparan, dan profesional, serta memastikan keluarga korban memperoleh kepastian hukum dan keadilan. 2. Komisi III DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di seluruh universitas di Indonesia, khususnya terkait jam belajar, senioritas, perundungan, serta praktik pungli yang kerap terjadi. 3. Komisi III DPR RI meminta Divpropam Mabes Polri mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Metro Jakarta Timur dalam kasus dugaan penyiksaan dan kriminalisasi kepada Sdr. Agus Warmon. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi III DPR RI meminta Polres Metro Jakarta Timur segera menindaklanjuti Laporan Polisi No. STTLP/V.4376/VII/2023/SPKT/POLDAMETROJAYA terkait dugaan perampasan kemerdekaan sesuai Pasal 333 KUHP oleh Sdr. Ridwan Pranata dkk terhadap Sdr. Agus Warmon dan Laporan Nomor: 642/II/2023/SPKT/POLDAMETROJAYA terkait pasal 170 KUHP yang ditangani oleh Resmob Polda Metro Jaya.</p> <p>5. Komisi III DPR RI meminta Polda Metro Jaya untuk berhati-hati dalam memeriksa laporan karena adanya dugaan rekayasa dalam proses pemeriksaan laporan terhadap Sdr. Agus Warmon oleh Unit 3 Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya dan tidak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan.</p> <p>6. Komisi III DPR RI meminta Mabes TNI menindaklanjuti Laporan No. STTLP/19/VIII/2023/JAYA terkait dugaan keterlibatan oknum TNI pada tindak penganiayaan, penculikan dan pengeroyokan Sdr. Agus Warmon secara transparan dan profesional.</p>	
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 3. Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. 4. Jovi Andrea Bachtiar, S.H. dan Kuasa Hukumnya. 	<p>RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024, membahas Kasus yang melibatkan Jaksa atas nama Jovi Andrea Bachtiar, S.H.</p>	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memastikan laporan yang disampaikan oleh Sdri NM kepada Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor: STTLP/B/177/V/2024/SPKT/POLRES TAPANULI SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA agar diproses secara profesional, transparan, akuntabel serta 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mendorong penyelesaian dengan mengedepankan keadilan restoratif. 2. Komisi III DPR RI meminta Kejaksaan Agung RI untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian sanksi kepada Sdr Jovi Andrea Bachtiar dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. 3. Komisi III DPR RI meminta kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan yang disampaikan oleh seluruh jajaran korps Adhyaksa dengan transparan, adil, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
5.	1. Kepala Kepolisian Daerah 2. Kepala Kejaksaan Tinggi 3. Kepala BNN Provinsi	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dilaksanakan pada 22-26 November 2024.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke : 1. Provinsi Jawa Timur, tanggal 22-24 November 2024, dalam rangka pengawasan penegakan hukum pada sektor Kamtibmas, sektor sumber daya alam dan perjudian; 2. Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 23-25 November 2024, dalam rangka pengawasan penegakan hukum pada sektor Kamtibmas, sektor sumber daya alam dan perjudian; 3. Provinsi Sumatera Barat, tanggal 25-26 November 2024, dalam rangka pengawasan penegakan hukum terhadap kasus penembakan yg terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat.	
6.	1. Direktorat Penuntutan Umum Hongkong	Kunjungan Kerja Pengawasan ke Negara Hongkong dilaksanakan pada	Kunjungan Komisi III DPR RI ke Negara Hongkong dalam rangka mencari informasi, bahan, dan data baik berupa	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>dibawah Departemen Kehakiman Hongkong</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Hongkong Police Force (HKPF)</i> 3. Konsulat Kejaksaan 4. Konsulat Kepolisian RI 	<p>tanggal 29 November s.d. 5 Desember 2024.</p>	<p>masukn maupun perbandingan mengenai pengaturan, strategi kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan fungsi kepolisian dan kejaksaan di wilayah Hongkong dari berbagai instansi atau pihak terkait sehingga mampu menjawab berbagai persoalan dan perdebatan terkait pengawasan pelaksanaan fungsi kepolisian dan kejaksaan.</p>	
7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Propam Polda Jawa Tengah 2. Kapolrestabes Semarang. 3. Ditreskrim Polda Jawa Tengah 	<p>RDP Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, membahas Peristiwa penembakan oleh oknum aparat.</p>	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Komisi III DPR RI meminta Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Ditreskrim Polda Jawa Tengah dan Kapolrestabes Semarang untuk mengusut tuntas kasus penembakan terhadap Sdr. Alm. Gamma Rizkynata Oktafiandi secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengungkap seluruh pelaku yang terlibat. 6. Komisi III DPR RI meminta Kapolrestabes Semarang untuk mengoptimalkan peran harkamtibmas, khususnya dalam meningkatkan pola pembinaan perilaku remaja di Kota Semarang dengan tujuan untuk mencegah maraknya tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja. 	
8.	<p>Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri</p>	<p>RDP Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, membahas Pengaman dan Penegakan hukum di Bidang Lalu Lintas dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.</p>	<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI meminta Kakorlantas Polri dan jajarannya untuk meningkatkan pengamanan dan pelayanan lalu lintas dalam menghadapi Liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Komisi III DPR RI meminta Kakorlantas Polri untuk meningkatkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 dalam rangka mendukung keuangan negara yang kuat dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Komisi III DPR RI mengingatkan kepada Kakorlantas Polri agar menghadiri rapat terkait tupoksi hanya di Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja.</p>	

D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029</p> <p>1. Agus Joko Pramono 2. Ahmad Alamsyah Saragih 3. Djoko Poerwanto 4. Fitroh Rohcahyanto 5. Ibnu Basuki Widodo 6. Ida Budhiati 7. Johanis Tanak 8. Michael Rolandi Cesnanta Brata 9. Poengky Indarti 10. Setyo Budiyo</p>	<p>Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK, serta Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029.</p>	<p>Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 11 November 2024 yang dituangkan dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/699/PW.11.01/11/2024 tertanggal 11 November 2024 bahwa Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Uji Kelayakan (<i>fit and proper test</i>) Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029.</p>	---
		<p>Rapat Pengambilan Nomor Urut dan Pembuatan Makalah Para Calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tanggal 18 November 2024.</p>	<p>Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi III DPR RI melaksanakan rangkaian Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK, serta Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu pengambilan nomor urut uji kelayakan dilanjutkan dengan pembuatan makalah pada tanggal 18 November 2024.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>Calon Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benny Jozua Mamoto 2. Chisca Mirawati 3. Elly Fariani 4. Gusrizal 5. Hamdi Hassyarbaini 6. Heru Kreshna Reza 7. Iskandar Mz 8. Mirwazi 9. Sumpeno 10. Wisnu Baroto 	<p>Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK, serta Konsultasi dan Pendalaman Calon Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 18 s.d. 21 November 2024.</p>	<p>Kegiatan Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK, serta Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dilaksanakan selama 4 (tiga) hari berdasarkan nomor urut yang telah diambil oleh masing-masing Calon, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendalaman terhadap Calon Pimpinan KPK, dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 November 2024; dan 2. Pendalaman terhadap Dewan Pengawas KPK, pada tanggal 20 s.d. 21 November 2024. <p>Masing-masing Calon memaparkan makalahnya dilanjutkan dengan melakukan diskusi dengan Komisi III DPR RI dan sebelum mengakhiri rapat para Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 menandatangani Surat Pernyataan.</p>	
		<p>Rapat Pleno Komisi III DPR RI tanggal 21 November 2024.</p>	<p>Rapat Pleno Komisi III DPR RI dalam rangka Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK serta pemilihan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dilaksanakan tanggal 21 November 2024, dan setelah mendengarkan Pandangan Fraksi-Fraksi, Pemilihan dan Penetapan Calon dilaksanakan dengan mekanisme pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting).</p> <p>Setelah dilakukan voting, maka Komisi III DPR RI memutuskan memilih dan menetapkan 5 (lima) orang Pimpinan KPK Masa Jabatan 2024-2029, sekaligus memilih salah satu dari 5 orang Pimpinan KPK Terpilih sebagai Ketua KPK, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setyo Budiyanto, sebagai Ketua. 2. Johanis Tanak, sebagai Wakil Ketua. 3. Fitroh Rohcahyanto, sebagai Wakil Ketua. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Agus Joko Pramono, sebagai Wakil Ketua. 5. Ibnu Basuki Widodo, sebagai Wakil Ketua.</p> <p>Berdasarkan hasil voting, Komisi III DPR RI memilih dan merekomendasikan 5 nama Calon Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benny Jozua Mamoto 2. Chisca Mirawati 3. Wisnu Baroto 4. Gusrizal 5. Sumpeno <p>Komisi III DPR RI menyampaikan hasil pemilihan dan penetapan Pimpinan KPK serta rekomendasi Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 kepada Pimpinan DPR RI melalui surat nomor B/324-DW/KOM.III/MP.I/11/2024 tertanggal 21 November 2024.</p>	
		<p>Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Desember 2024.</p>	<p>Ketua Komisi III DPR RI (Bp. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.) melaporkan hasil pembahasan Rapat Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan KPK serta Konsultasi dan Pendalaman Calon Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Desember 2024.</p> <p><u>Keputusan Rapat Paripurna :</u> DPR RI Memilih dan Menetapkan Pimpinan KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setyo Budiyanto, sebagai Ketua. 2. Johanis Tanak, sebagai Wakil Ketua. 3. Fitroh Rohcahyanto, sebagai Wakil Ketua. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Agus Joko Pramono, sebagai Wakil Ketua. 5. Ibnu Basuki Widodo, sebagai Wakil Ketua Dan memilih serta merekomendasikan 5 orang sebagai Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu : 1. Benny Jozua Mamoto 2. Chisca Mirawati 3. Wisnu Baroto 4. Gusrizal 5. Sumpeno	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	-	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 31 Oktober 2024 dengan: 1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; 5. Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional; 6. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia; dan 7. Direktur Utama Perum Bulog.	Permintaan Usulan RUU dalam Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2024-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.	-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Wakil Ketua DPR RI/Korinbang 2. Anggota Komisi IV DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada 22 Oktober 2024.	Penetapan Pimpinan Komisi IV DPR RI: 1. Ketua: Siti Hediati Soeharto, S.E. (A-117)/ Fraksi Partai Gerindra; 2. Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P. (A-162)/ Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;	-

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua: Ir. Panggah Susanto, M.M. (A-316)/ Fraksi Partai Golongan Karya; 4. Wakil Ketua: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si. (A-466)/ Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; 5. Wakil Ketua: Ahmad Yohan, M.Si. (A-522)/ Fraksi Partai Amanat Nasional. 	
2.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Program Kerja Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025; dan 2. Lain-lain. 	-
4.	Menteri Pertanian	Rapat Kerja dilaksanakan pada 5 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan; 2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025. 	-
5.	Direktur Utama Perum Bulog	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 5 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan; 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024; 3. Penjelasan Rencana Program Kerja dan Kegiatan serta Program kerja Prioritas TA 2025; dan 4. Isu-isu aktual. 	-
6.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada 6 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan; 2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025. 	-
7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pangan Nasional; 2. Kepala Badan Karantina Indonesia. 	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 6 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan; dan 2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025. 	-

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pekerjaan Umum 2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Kementerian Desa dan PDT 4. Kementerian Transmigrasi 	Raker dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perubahan RKA K/L Kementerian Pekerjaan Umum dan Persetujuan RKA/KL Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam APBN TA 2025. 2. Penetapan Perubahan RKA K/L Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Persetujuan RKA/KL Kementerian Transmigrasi Dalam APBN TA 2025 Lain-lain. 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga & BPJT, Ditjen Sumber Daya Air) 2. Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Darat), PT Jasa Marga 3. KNKT 4. Kakorlantas Polri 	Kunker Reses di Laksanakan pada tanggal 13 - 15 November 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjau Tol Bocimi Kab Sukabumi Prov. Jabar. 2. Peninjauan Tol Cipularang KM.92. 3. Peninjauan Bendungan Jatigede Kab. Majalengka Prov. Jabar. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 6. Kementerian Transmigrasi			
2.	1. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga, SDA, BPJT dan BUJT) 2. Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut, Udara Dan Darat, Perkereta Apian) 3. BMKG 4. BNPP / Basarnas 5. Stake Holder Terkait (PT AP Indonesia, PT Pelni, PT Pelindo, Airnav, PT KAI Dan PT ASDP)	Kunker Spesifik dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 November 2024.	1. Medan Prov. Sumut. 2. Makassar Prov. Sulsel. 3. Batam Prov. Kepri.	
3.	DPRD Banyumas	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024.	Konsultasi Mengenai Pengendalian Banjir Di Kabupaten Banyumas.	
4.	1. Kementerian Perhubungan 2. Kementerian PU 3. BMKG 4. BASARNAS 5. KAKORLANTAS	Raker / RDP dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024.	Membahas kesiapan infastruktur dan Transportasi dalam rangka Natal 2024 dan tahun Baru 2025, Menghadirkan Operator Transportasi Nasional dan BUMN Teknis terkait Infrastruktur dan Transportasi serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).	
5.	DPRD Kab. Asahan	Audiensi dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024.	Konsultasi Tentang Percepatan Optimalisasi PSN di Kab Asahan	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. PT. Bank BRI b. PT. Bank Mandiri c. PT. Bank BNI d. PT. Bank BTN e. PT. Bank BSI	Rapat Dengar Pendapat tanggal 13 November 2024 dengan Direktur Utama: a. PT. Bank BRI b. PT. Bank Mandiri c. PT. Bank BNI d. PT. Bank BTN e. PT. Bank BSI	Dalam rangka pembahasan terkait dengan: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2. Evaluasi kinerja korporasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025.	
2.	a. PT. Bank BRI b. PT. Bank Mandiri c. PT. Bank BNI d. PT. Bank BTN e. PT. Bank BSI	Rapat Dengar Pendapat tanggal 13 November 2024 dengan Direktur Utama: a. PT. Bank BRI b. PT. Bank Mandiri c. PT. Bank BNI d. PT. Bank BTN e. PT. Bank BSI	Dalam rangka pembahasan terkait dengan: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI 2. Evaluasi kinerja korporasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	a. PT. Bank BRI b. PT. Bank Mandiri c. PT. Bank BNI d. PT. Bank BTN e. PT. Bank BSI	Rapat Dengar Pendapat tanggal 13 November 2024 dengan Direktur Utama: a. PT. Bank BRI b. PT. Bank Mandiri c. PT. Bank BNI d. PT. Bank BTN e. PT. Bank BSI	Dalam rangka pembahasan terkait dengan: a. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI b. Evaluasi kinerja korporasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 c. Penyampaian rencana kejadian <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025.	
4.	Kementerian BUMN RI PT. Pelindo	Kunjungan kerja spesifik ke PT. Pelindo di Kota Denpasar Provinsi Bali tanggal 14-16 November 2024.	Dalam rangka peninjauan perkembangan pembangunan Bali <i>Maritim Tourism Hub</i> .	
5.	Kementerian BUMN RI PT. Brantas Abipraya	Kunjungan kerjaspesifik ke PT. Brantas Abipraya di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali tanggal 14-16 November 2024.	Dalam rangka peninjauan perkembangan pembangunan Bendungan Sidan.	
6.	a. Kementerian BUMN RI b. Kementerian Perdagangan RI: Perum Bulog	Kunjungan kerja spesifik ke Perum Bulog di Kabupaten Badung Provinsi Bali tanggal 14-16 November 2024.	Dalam rangka peninjauan persiapan dukungan sektor pangan menjelang libur natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Raker dilaksanakan pada hari Senin 18 November 2024, pukul 13.00 WIB, dengan agenda Pemaparan dan Pembahasan Program Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dan lain-lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI mengenai alokasi pagu anggaran Kementerian Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI TA 2025 sebesar Rp 279.606.498.000,- (<i>Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah</i>). 2. Komisi VII DPR RI mendukung tambahan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif dan mendesak Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran sebesar Rp 2.422.556.275.000,- (<i>Dua Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah</i>) sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI kepada DPR RI. Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menyampaikan kebutuhan anggaran ini kepada Presiden RI dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah. 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna mewujudkan Asta Cita kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam; b. mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja kementerian/badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; c. mempercepat penyelesaian proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola terkait perubahan nomenklatur Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II; d. menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. <p>4. Komisi VII DPR RI mendukung tersusunnya regulasi yang dapat mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usulan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perihal perlindungan yang lebih maksimal bagi para pemegang hak cipta dalam rangka pertumbuhan ekonomi kreatif; b. usulan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perihal perubahan Ekonomi Kreatif dari sub urusan menjadi urusan. <p>5. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang belum terjawab dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Menteri UMKM	Raker dilaksanakan pada hari Selasa 19 November 2024, pukul 13.00 WIB, dengan agenda Pembahasan Program Kerja Kementerian UMKM TA 2025 dan lain-lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI mengenai alokasi pagu anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI TA 2025 setelah dipisah dengan Kementerian Koperasi adalah sebesar Rp463.856.211.000,- (<i>Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah</i>). 2. Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mendesak Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran sebesar Rp1.235.052.581.000 (<i>Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah</i>) sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada DPR RI guna melaksanakan program/kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. SAPA UMKM; b. Kartu Usaha; c. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal, melalui pendampingan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB); d. Re-design PLUT-UMKM dan Layanan Rumah Kemasan; e. UMKM terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis; f. Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok serta Perluasan Pemasaran; 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>g. Perluasan Akses Pembiayaan dan Investasi; h. Pendataan lengkap UMKM; i. Inkubasi Usaha; j. Konsultasi dan Pendampingan Usaha; dan k. Penyediaan sarana dan prasarana Kementerian UMKM.</p> <p>3. Komisi VII DPR RI mendorong agar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden RI dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah.</p> <p>4. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan UMKM, antara lain:</p> <p>a. Mengintegrasikan data dan program pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga; b. Melaksanakan pendampingan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, yang sekurang-kurangnya mencakup pendampingan perizinan usaha (aspek legalitas, sertifikasi, standarisasi), akses permodalan, akses pemasaran dan kemitraan baik bagi para pengusaha UMKM dan Wirausaha; dan c. Mengakselerasi penyusunan implementasi penghapusan piutang macet bagi pengusaha UMKM dan pembentukan <i>holding</i> UMKM.</p> <p>5. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2025 dengan optimal guna perwujudan Asta Cita ketiga, keempat, keenam dan ketujuh;</p> <p>b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya;</p> <p>c. Mempercepat penyelesaian proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola terkait perubahan nomenklatur Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II;</p> <p>d. Menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.</p> <p>6. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.</p>	
3.	Menteri Pariwisata	Raker dilaksanakan pada hari Rabu 20 November 2024, pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemaparan dan Pembahasan Program Kerja Kementerian Pariwisata dan lain-lain.	<p>1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Pariwisata RI mengenai alokasi pagu anggaran Kementerian Pariwisata RI TA 2025 sebesar Rp1.488.741.453.000,- (<i>Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah</i>).</p> <p>2. Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata dan mendesak Kementerian Pariwisata untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran sebesar</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Rp2.254.706.954.000,- (<i>Dua Triliun Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi VII DPR RI mendorong agar Kementerian Pariwisata menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden RI dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah.</p> <p>4. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Pariwisata RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna perwujudan Asta Cita ketiga; b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya; c. Mempercepat penyelesaian proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola terkait perubahan nomenklatur Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II; d. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan pariwisata; dan e. Menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.	
4.	Kepala BSN	RDP Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 13.00 WIB, dengan agenda Pembahasan Program Kerja BSN dan Lain-lain.	Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional melakukan perbaikan bahan paparan Program Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk disampaikan kembali kepada Komisi VII DPR RI paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini dan akan ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.00 WIB.	
5.	Menteri Ekraf/Badan Ekonomi Kreatif	Raker Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, dengan agenda Tindak lanjut Raker Komisi VII dan Menteri Menteri Ekraf/Badan Ekonomi Kreatif tanggal 18 Nov tentang pembahasan program kerja dan anggaran tahun 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VII DPR RI menyetujui pagu anggaran TA 2025 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp279.606.498.000 (<i>Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah</i>) dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2.422.556.275.000 (<i>Dua Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah</i>), sehingga total pagu anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp2.702.162.773.000,- (<i>Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah</i>). 2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif segera berkomunikasi dengan Presiden RI, Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti poin pertama. 3. Komisi VII DPR RI menyetujui usulan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang: 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kerja dan program prioritas untuk mendukung pencapaian Asta Cita dan mengacu pada Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN yang disusun oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, dan b. Penyempurnaan SOTK dan pengisian sumber daya manusia yang kompeten. <p>4. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif terkait Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usulan revisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perihal Perubahan Ekonomi Kreatif dari Sub-Urusan menjadi Urusan Pemerintah; dan b. Usulan revisi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Pelindungan yang lebih maksimal bagi para pemegang hak cipta produk dan jasa kreatif. <p>5. Komisi VII DPR RI mendukung upaya Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif menjadikan ekonomi kreatif sebagai sektor penggerak ekonomi masa depan yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan berdasarkan Asta Cita.</p> <p>6. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun ekosistem industri kreatif yang terintegrasi; b. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan sub sektor guna mendukung <i>quick win</i> dan program unggulan; c. Mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan ekonomi kreatif; dan 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>d. Menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.</p> <p>7. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan/pernyataan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.</p>	
6.	Kepala BSN	RDP Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.00 WIB, dengan agenda Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional pada tanggal 3 Desember 2024 tentang Pembahasan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 dan Lain-lain.	<p>1. Komisi VII DPR RI menyetujui pagu anggaran TA 2025 Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp223.867.121.000,- (<i>Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah</i>).</p> <p>2. Komisi VII DPR RI mendesak Badan Standardisasi Nasional untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna perwujudan Asta Cita, khususnya Asta Cita kedua, ketiga, kelima dan keenam;</p> <p>b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>c. Menyusun Peta Jalan Pengembangan Standar Nasional Indonesia termasuk tantangan dan hambatan Badan Standardisasi Nasional dalam menjalankan program kerja baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Peta Jalan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Komisi VII DPR RI paling lama bulan Maret 2025; dan</p> <p>d. Menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dalam melaksanakan Rencana Program Kerja Anggaran Tahun 2025.</p> <p>3. Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan/ Pernyataan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Spesifik Ke- II Komisi VII DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> Sulawesi Selatan tanggal 13 – 15 November 2024. Kalimantan Selatan tanggal 13 – 15 November 2024. Sumatera Utara tanggal 14 – 16 November 2024. 	<ol style="list-style-type: none"> Sulawesi Selatan : Kunjungan Spesifik bertujuan untuk mengawasi kinerja industri non-migas di Kawasan Industri Makassar. Tujuan spesifiknya adalah memperoleh informasi tentang kinerja, tantangan, dan hambatan dalam produksi serta pemanfaatan teknologi. Kalimantan Selatan : Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tantangan IKM Sasirangan, masukan dari pelaku IKM, implementasi program pemerintah, dan data untuk kebijakan yang mendukung IKM. Sumatera Utara : Kunjungan lapangan bertujuan untuk mengawasi kinerja industri non-migas di Kawasan Industri Medan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kinerja, tantangan, kendala, dan hambatan yang dihadapi dalam produksi dan pemanfaatan teknologi. 	
2.	Kunjungan Spesifik Ke- III Komisi VII DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> Provinsi Gorontalo Provinsi Lampung 	<ol style="list-style-type: none"> Gorontalo : Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Desa Wisata Botubarani, Gorontalo. Tujuan spesifiknya adalah: 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. Provinsi Jawa Barat (Cikarang Kab. Bekasi) Dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 21 s.d. 23 November 2024.	a. Mendapatkan informasi tentang perkembangan Desa Wisata Botubarani. b. Mendapatkan informasi tentang tantangan dan kendala yang dihadapi. c. Mendapatkan informasi tentang langkah strategis untuk pengembangan desa wisata. 2. Lampung : Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan mengumpulkan informasi tentang tantangan IKM keripik pisang di Bandar Lampung, masukan dari pelaku IKM, implementasi program pemerintah untuk dukungan IKM, dan data untuk perumusan kebijakan yang lebih baik. 3. Jawa Barat (Cikarang): Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Mondelēz Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, bertujuan untuk: a. Mendapatkan informasi tentang bahan baku lokal dan impor serta rantai pasok produk. b. Mengumpulkan informasi mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. c. Mengumpulkan data untuk mendukung kebijakan Making Indonesia 4.0.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal	<p>Rabu, 4 Desember 2024</p> <p>Raker Komisi VIII DPR RI dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Realokasi Anggaran Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025; 2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penyelenggara Haji Tahun Anggaran 2025; 3. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun Anggaran 2025. 	<p>Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Kepala BPH RI, Kepala BPJPH RI, yang membahas “Realokasi Anggaran Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja dan Anggaran BPH RI Tahun Anggaran 2025, serta Rencana Kerja dan Anggaran BPJPH RI Tahun Anggaran 2025”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agama RI, BPH RI, dan BPJPH RI tahun anggaran 2025 setelah restrukturisasi dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Agama RI pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran sebesar Rp.79.168.712.137.000,- (<i>Tujuh puluh sembilan triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah</i>) kemudian di alokasikan untuk BPH RI sebesar Rp.179.739.976.000 (<i>seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu</i> 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>rupiah)</i> dan untuk BPJPH RI sebesar Rp.436.812.997.000 (<i>empat ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah</i>), maka alokasi anggaran Kementerian Agama RI menjadi Rp.78.552.159.164.000 (<i>tujuh puluh delapan triliun lima ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah</i>), yang dialokasikan berdasarkan unit eselon I.</p> <p>2) BP Haji RI pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran sebesar Rp179.739.976.000 (<i>seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah</i>), yang dialokasikan berdasarkan program.</p> <p>3) BPJPH RI pada tahun anggaran 2025 mendapat pagu anggaran sebesar Rp.436.812.997.000 (<i>empat ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah</i>) yang dialokasikan berdasarkan unit eselon I.</p> <p>2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI untuk menyusun rincian realokasi anggaran dari eselon I Kementerian Agama RI yang dialokasikan untuk BPH RI dalam rapat kerja berikutnya.</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BPH RI untuk menyusun rincian penggunaan anggaran sebesar Rp.179.739.976.000 (<i>Seratus tujuh puluh sembilan miliar</i></p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</i> yang dialokasikan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, BPH RI menggunakan anggaran yang ada di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BPJPH RI untuk menyusun rincian penggunaan anggaran yang sebesar Rp.436.812.997.000 (<i>Empat ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah</i>) dan proyeksi penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar	Senin, 18 November 2024 Pukul 13.00 WIB RDPU Komisi VIII DPR RI dengan agenda Menerima Pengaduan atas Skorsing terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tentang Ancaman Sanksi Administrasi dan Akademik Berupa Skorsing Hingga Pemecatan (<i>Drop Out</i>) Pada Kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi audiensi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar terkait tentang Ancaman Sanksi Administrasi dan Akademik Berupa Skorsing Hingga 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pemecatan (<i>Drop Out</i>) pada Kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR.</p> <p>2. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar menyampaikan aspirasi berdasarkan kronologi permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a) Pada tanggal 25 Juli 2024 Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 2591 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dilingkup UIN Alauddin Makassar yang bersifat mengatur melebihi ketentuan konstitusi tentang Aturan Prosedur Penyampaian Unjuk Rasa/Demonstrasi/Penyampaian Aspirasi oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang mengharuskan menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas UIN Alauddin Makassar.</p> <p>b) Pada tanggal 31 Juli 2024 mahasiswa lintas fakultas UIN Alauddin Makassar melakukan aksi unjuk rasa terkait penolakan Surat Edaran tersebut Rektor UIN Alauddin Makassar tahun 2024 tentang ketentuan Penyampaian aspirasi lingkup UIN Alauddin Makassar. Unjuk rasa tersebut dilakukan di depan Gedung Rektorat UIN Alauddin Makassar disertai dengan orasi, yang pada prinsipnya menolak pemberlakuan dan pelaksanaan Surat Edaran Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 2591 Tahun 2024 melanggar hak-hak dasar mahasiswa, khususnya hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, hak atas kebebasan</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>berserikat dan berekspresi serta prinsip kebebasan akademik. Hal tersebut karena surat edaran tersebut terdapat ancaman sanksi administrasi dan akademik berupa skorsing hingga pemecatan (<i>Drop Out</i>).</p> <p>c) Pada tanggal 13 Agustus pihak Rektorat mengeluarkan skorsing terhadap tiga puluh (30) orang Mahasiswa, dan (1) orang Presma selama 1 (satu) semester.</p> <p>d) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3150 tentang Pembekuan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.</p> <p>e) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar melakukan upaya hukum secara litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar melalui kuasa hukum Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sulsel yang terdaftar sejak tanggal 23 Oktober 2024 dengan nomor perkara 98/G/2024/PTUN.MKS yang diketuai langsung oleh Dr. Chibu Mattingara S.H., M.H.</p> <p>f) Pada tanggal 18 November 2024 Mahasiswa UIN Alauddin Makassar bertemu dengan Komisi VIII DPR RI untuk menyampaikan aspirasi.</p> <p>3. Tuntutan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar agar permasalahan demikian tidak lagi terulang dan hak-hak mahasiswa bisa dikembalikan sebagaimana mulanya. Adapun tuntutan dan harapan sebagai berikut:</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Meminta kepada DPR RI untuk mendesak Rektor UIN Alauddin Makassar untuk segera mencabut Surat Edaran Nomor 3652 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 2591 tentang Mekanisme Penyampaian Aspirasi Mahasiswa dan mencabut Surat Keputusan skorsing terhadap 31 Mahasiswa serta memulihkan segala hak sebagai mahasiswa mengingat permasalahan ini telah berlangsung kurang lebih 3 bulan.</p> <p>b. Mendorong Kementrian Agama RI Untuk melakukan evaluasi, koordinasi dan monitoring secara intensif dan masif terhadap semua kampus di Indonesia di bawah naungan Kementerian Agama RI terkhusus di lingkungan UIN Alauddin Makassar dalam rangka menjaga, menjamin, dan melindungi Kebebasan Mimbar Akademik, Kebebasan Berekspresi, Kebebasan Berpendapat sebagai perwujudan perlindungan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia.</p> <p>c. Meminta atensi DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong lembaga peradilan untuk menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan (mengingat gugatan mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang menjadi korban skorsing melalui Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Sulawesi Selatan sementara bergulir di PTUN Makassar).</p> <p>d. Meminta kepada DPR RI untuk memberikan SANKSI kepada Rektor UIN Alauddin Makassar dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan dalam dunia pendidikan di Indoensia.</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi VIII DPR RI memberikan saran dan pendapat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menindaklanjuti pertemuan dengan mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Agama RI dan segera dipulihkan hak-hak mahasiswa UIN Alauddin Makassar. b) Menyayangkan kekerasan yang dialami oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada aksi Penyampaian Aspirasi dilingkup UIN Alauddin Makassar. c) Mendesak mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk berdialog kembali dengan pihak Rektor untuk mendapatkan titik temu dan mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan skorsing terhadap mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 	
2.	<p>Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (FORGUPAKI)</p>	<p>Selasa, 19 November 2024 Pukul 13.00 WIB RDPU dengan agenda Persoalan yang dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia.</p>	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (FORGUPAKI) tentang Persoalan yang Dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi audiensi Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (FORGUPAKI) tentang persoalan yang dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. 2. FORGUPAKI menyampaikan aspirasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan guru pendidikan Agama Kristen di sekolah negeri, khususnya di luar Jakarta sangat tidak terpenuhi. Secara proporsional, kebutuhan guru pendidikan Agama Kristen untuk tingkat SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>sebesar 47.518 orang. Pada saat ini, rasio jumlah guru pendidikan Agama Kristen adalah 1 banding 8,5. Artinya dari 8 atau 9 sekolah negeri, hanya ada satu guru pendidikan Agama Kristen.</p> <p>b. Kesejahteraan guru pendidikan Agama Kristen sangat minim, honorarium yang diterima hanya berasal dari sumber anggaran sebagai guru ekstrakurikuler, upah dari Dana BOS, atau dari Biaya Operasional (BOP) sekolah. Status kedinasan guru pendidikan Agama Kristen di sekolah negeri juga tidak jelas, akibat amat sulit untuk masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, sertifikasi bagi guru di sekolah negeri diharapkan hanya satu pintu saja, yaitu di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan bagi guru sekolah swasta tetap di Kementerian Agama.</p> <p>c. FORGUPAKI memohon agar Peraturan Menteri Agama No.16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah perlu dilakukan peninjauan kembali sebagai upaya penyesuaian kebijakan.</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI memberikan saran dan pendapat sebagai berikut:</p> <p>a) Problematika tentang guru pendidikan Agama Kristen merupakan isu lintas kementerian, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga perlu koordinasi dan sinkronisasi, terutama soal regulasi yang ada. Selain itu, perlu diperjelas tentang</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kedudukan guru pendidikan agama berada di bawah naungan Kementerian Agama atau di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>b) Berbagai aspirasi yang berada pada lingkup kerja Komisi VIII DPR RI akan dikomunikasikan dengan Kementerian Agama, khususnya terkait usulan peninjauan kembali Peraturan Menteri Agama No.16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Sedangkan persoalan yang berada di luar lingkup kerja Komisi VIII DPR RI, maka akan disampaikan secara lintas komisi.</p>	
3.	<p>Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia Nusantara Jaya</p>	<p>Selasa, 19 November 2024 Pukul 15.00 WIB RDPU dengan agenda Memberikan masukan-masukan terhadap kepengurusan DPP LASQI Nusantara Jaya.</p>	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan DPP Lembaga Seni Qosidah Indonesia (LASQI) tentang Audiensi dan Silaturahmi DPP Pengurus LASQI NUSANTARA JAYA, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi audiensi Lembaga Seni Qosidah Indonesia (LASQI NUSANTARA JAYA) dan mendukung aspirasi selama sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Lembaga Seni Qosidah Indonesia (LASQI) menyampaikan aspirasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. LASQI mempunyai visi yakni Trilogi berupa pembinaan, pengembangan dakwah dan ukhuwah melalui seni qosidah b. Mohon dukungan dari Komisi VIII DPR RI agar Qosidah dibawah LASQI dilibatkan dalam event nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. b. LASQI awalnya di bawah bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama RI dan pernah diterbitkan SK oleh 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Bimas Islam d. Lomba Qosidah dahulu dibarengkan dengan event MTQ Nasional.</p> <p>c. Grup Qosidah di setiap Kabupaten/Kota itu banyak dan belum <i>disupport</i> sepenuhnya oleh Kementerian Agama RI.</p> <p>d. Kegiatan LASQI bukan hanya qosidah tapi juga bidang lainnya seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI memberikan saran dan pendapat sebagai berikut:</p> <p>a. Mendorong Kementerian Agama RI untuk mendukung LASQI Nusantara Jaya masuk dalam pembinaan Bimas Islam</p> <p>b. Mendukung kegiatan lomba Qosidah Nusantara Jaya disertakan dengan event MTQ Nasional sesuai dengan tingkatannya</p> <p>c. Merekomendasikan LASQI Nusantara Jaya ke lembaga dan instansi terkait seperti Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI dan mitra Komisi VIII DPR RI.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Jendral Kemenkes RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI dan Dirut Rumah Sakit Vertikal Kemenkes RI	Rabu, 13 November 2024, Pukul 10.00 WIB s.d. selesai. Acara: Membahas Penguatan Fungsi dan Peran Rumah Sakit Vertikal dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan akselerasi pilar transformasi Sistem Kesehatan Nasional guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan meningkatkan daya saing rumah sakit vertikal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan seluruh rumah sakit vertikal berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Penguatan ekosistem pelayanan kesehatan rujukan, termasuk manajemen layanan kesehatan, perbaikan tata kelola rumah sakit dan standar produktivitas kinerja spesialis;b. Pemenuhan alat kesehatan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah;c. Memastikan standar pelayanan berjalan maksimal dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> d. Penguatan sistem jejaring pengampuan dan peningkatan kapabilitas rumah sakit madya dan rumah sakit utama; e. Memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di rumah sakit vertikal. <ol style="list-style-type: none"> 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan seluruh rumah sakit vertikal untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pendidikan spesialis, sesuai dengan konstruksi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang sudah memiliki instrumen kuat, termasuk dalam mengatasi perundungan terhadap Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). 4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah mencari solusi dalam mendekatkan akses masyarakat terhadap rumah sakit vertikal, termasuk penyediaan rumah tunggu atau sejenisnya. 5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota pada rapat hari ini dan disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 20 November 2024. 	
2.	Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan	Rabu, 13 November 2024, Pukul 14.00 WIB s.d. selesai. Acara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI. 2. Penjelasan Ketua Dewas dan Dirut BPJS Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sistem pelayanan yang lebih inklusif, melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai dampak Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) terhadap akses dan kualitas pelayanan, 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		terhadap Program Kerja Tahun 2025.	<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan mekanisme pendampingan, pengawasan dan pengendalian potensi terjadinya fraud di faskes sedini mungkin, c. Memastikan perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap peserta BPJS Kesehatan dan pasien mandiri serta memperbaiki sistem antrian untuk menghindari kesenjangan layanan, d. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI terkait program skrining kesehatan untuk memastikan program dapat berjalan efektif, e. Memasukkan layanan terapi rehabilitasi psiko-sosial dan layanan kejiwaan ke dalam program JKN, dan f. Memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah terkait memastikan cakupan kepesertaan PBI-APBD. <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan tunggakan dari peserta JKN yang menghambat layanan, termasuk mengkaji kemungkinan pemberian kelonggaran pembayaran atau opsi lain yang tidak memberatkan bagi peserta yang tidak mampu. 3. Komisi IX DPR RI meminta penjelasan lengkap tentang dana investasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, termasuk alokasi dan keuntungan yang diperoleh secara tertulis. 4. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Kesehatan meningkatkan pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan yang transparan dan akuntabel, guna menjaga keberlanjutan program JKN dan mengurangi risiko finansial yang dapat memengaruhi layanan. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota pada rapat hari ini dan disampaikan kepada Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 20 November 2024.	
3.	<i>Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)</i>	Senin, 2 Desember 2024, Pukul 13.00 WIB s.d. selesai. Acara : Audiensi dengan <i>Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)</i> .	Komisi IX DPR RI mengapresiasi dan merima masukan dari <i>Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)</i> .	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Eselon I Kementerian Kebudayaan	Senin, 2 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI Acara: Pendalaman pembahasan RKP dan RKA Kementerian Kebudayaan Tahun Anggaran 2025.	Rapat tertutup	
2.	Eselon I Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Selasa, 3 Desember 2024 Pukul 09.00 WIB RDP (Konsinyasi) Komisi X DPR RI Acara: Pendalaman pembahasan RKP dan RKA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2025.	Rapat tertutup	
3.	Eselon I Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Rabu, 4 Desember 2024 Pukul 09.00 WIB RDP (Konsinyasi) Komisi X D.PR RI Acara: Pendalaman pembahasan RKP dan RKA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025.	Rapat tertutup	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI)	Rabu, 13 November 2024 Pukul 10.00 WIB RDPU Komisi X DPR RI Acara: Mendapatkan masukan mengenai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan bidang olahraga.	Komisi X DPR RI memberikan beberapa catatan sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> • Hasil evaluasi pelaksanaan PON XXI/2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dari KONI menjadi bahan masukan dalam pembahasan persiapan pelaksanaan PON XXII/2028 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah. • Mendukung KONI dan KOI memperkuat sinergi program pembinaan olahraga prestasi dengan pemerintah guna peningkatan prestasi atlet seperti penyediaan sarana prasarana latihan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan penerapan teknologi olahraga (<i>sport science</i>). • Mendukung KORMI dalam upaya memperkuat positioning olahraga masyarakat dalam konteks kebijakan, program, dukungan anggaran, kegiatan pembudayaan dan pemasalan olahraga, peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga, peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat menuju Generasi Emas 2045. • Mendorong KONI, KOI dan KORMI agar kompak dan berkolaborasi melakukan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat serta diplomasi olahraga. • Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) wajib diimplementasikan secara optimal dengan mengalokasikan anggarannya secara memadai. 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Kebudayaan	<p>Senin, 18 November 2024 Pukul 10.00 WIB Rapat Kerja Komisi X DPR RI Acara: 1) Reviu Pagu Definitif APBN Kemendikbudristek TA 2025, dan 2) Pemaparan Anggaran TA 2025 Kementerian Dikdasmen, Kementerian Diktisainstek, dan Kementerian Kebudayaan.</p>	Rapat tertutup	
		<p>Pukul 11.00 WIB Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Acara: 1) Pembahasan anggaran sebagai dampak perubahan nomenklatur Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen, Kemendiktisainstek, dan Kemenbud, dan 2) Pendalaman anggaran Kementerian Dikdasmen berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024.</p>	Rapat tertutup	
		<p>Pukul 14.00 WIB Raker Komisi X DPR RI</p>	Rapat tertutup	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Acara: 1) Pembahasan anggaran sebagai dampak perubahan nomenklatur Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen, Kemendiktisainstek, dan Kemenbud, dan 2) Pendalaman anggaran Kementerian Diktisainstek berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024.		
		Pukul 15.00 WIB Raker Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan Acara: 1) Pembahasan anggaran sebagai dampak perubahan nomenklatur Kemendikbudristek menjadi Kemendikdasmen, Kemendiktisainstek, dan Kemenbud, dan 2) Pendalaman anggaran Kementerian Kebudayaan berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2024 tanggal	Rapat tertutup	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		5 November 2024, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024.		
3.	Kunjungan Kerja Spesifik	Tanggal 20—22 November 2024 Kunker Spesifik Bidang Pendidikan (PPDP Zonasi, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Ujian Nasional) Komisi X DPR RI ke Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Bandung.	<p>Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Yogyakarta merekomendasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk mengidentifikasi kebijakan inovasi yang menjawab permasalahan PPDB di daerah, sehingga dapat antar-Pemda dapat saling berbagi praktik baik untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meminimalisir permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI mengevaluasi kebijakan peningkatan mutu dan kompetensi guru yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI segera membuat langkah perbaikan terkait peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, antara lain memberikan kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan kelas yang aman dan nyaman serta mampu memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk membuat kajian komprehensif mengenai perlunya standar pemetaan mutu atau kualitas hasil belajar siswa kelas akhir dan instrumen pengukuran yang membangun motivasi belajar serta kompetisi siswa. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan in 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			klusi dan membuat skema pemenuhan kebutuhan guru yang memiliki kompetensi mendidik dengan keragaman karakteristik ABK, sehingga hak belajar dan mendapatkan pendidikan bagi ABK dapat terpenuhi dalam sekolah inklusi.	
			<p>Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Surabaya merekomendasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengkaji dan menyelesaikan persoalan yang masih terjadi di Kota Surabaya, yaitu terkait perlunya peningkatan sarpras Pendidikan, perhatian dan kelengkapan anak berkebutuhan khusus (sekolah inklusi), peningkatan perhatian terhadap guru bagi anak berkebutuhan khusus, kesiapan menghadapi tantangan pembelajaran literasi, serta beasiswa bagi anak dari masyarakat kurang mampu. • saling berkoordinasi dan menyelesaikan kendala pemenuhan kebutuhan Sarpras Pendidikan di SMAN 11 Surabaya yang terkendala administrasi karena berdiri di wilayah Perumnas. 	
			<p>Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Bandung merekomendasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR mendorong Kemendikdasmen RI untuk menerbitkan peraturan tentang PPDB (permendikbudristek dan turunannya) yang menjadi acuan penyusunan aturan tingkat daerah. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk merekomendasikan Pemerintah Daerah agar menentukan penetapan minimal kuota tiap jalur, sesuai dengan kondisi daerah dan hasil kajian PPDB sebelumnya. • Komisi X DPR mendorong Kemendikdasmen RI agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dalam penetapan zonasi dan kuota pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan kota serta antar provinsi.	
4.	Kunjungan Kerja Spesifik	Tanggal 28—30 November 2024 Kunker Spesifik Bidang Pendidikan (Kekerasan dan Perundungan di Satuan Pendidikan) Komisi X DPR RI ke Kota Makassar, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Serang.	<p>Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Makassar merekomendasikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperkuat sosialisasi terhadap Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46/2023 tentang PPKSP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) untuk memastikan bahwa sistem pengawasan, penanganan, dan pelaporan kasus kekerasan berjalan efektif sesuai dengan prinsip perlindungan anak. • saling berkoordinasi dan menyelesaikan kendala Sarpras pendidikan di SMPN 6 Makassar yang terkendala <i>overcapacity</i> yang mengakibatkan adanya 166 siswa yang belum terdaftar di DAPODIK. <p>Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Pekanbaru merekomendasikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI Mendorong Kemendikdasmen RI dan Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk terus melakukan sosialisasi dan mengawal implementasi Permendikbudristekdikti No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode 25 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan SK Walikota Pekanbaru No. 41 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI, dan Kemenbud RI untuk melakukan program turunan dari 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Permendikbudristekdikti No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) sebagai Merdeka Belajar Episode 25 termasuk dari budaya atau kearifan lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI dan Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk melakukan evaluasi berkala terhadap Implementasi dari kebijakan, melakukan pelibatan orang tua dan masyarakat, melakukan sosialisasi, pelatihan dan penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran khusus untuk melakukan pencegahan perundungan dan kekerasan di satuan pendidikan, perlu penyederhanaan prosedur pelaporan dan pemenuhan sumber daya. • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar ada Formasi PPPK untuk guru bimbingan konseling, terutama untuk komposisi guru pada satuan pendidikan yang tertinggi perundungannya. • Komisi X DPR RI mendorong BPMP Provinsi Riau secara khusus mengatasi TPPK dengan melakukan pencegahan dengan pelatihan. 	
			<p>Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Serang merekomendasikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI agar Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dapat dilaksanakan secara optimal, dengan terus menerus disosialisasikan dan melakukan kolaborasi dengan para pihak di daerah. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi pendidik dan SDM 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			lainnya yang menangani perundungan dan kekerasan di sekolah. <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkominfo untuk merumuskan strategi dan kebijakan dalam hal pemanfaatan TIK, agar tidak disalahgunakan dan berdampak negatif, sehingga melahirkan terjadinya perundungan. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap sarana prasarana di satuan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan yang di dalamnya terjadi perundungan, dan mempertimbangkan adanya sanksi hukum bagi pelakunya. 	
5.		Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 08.30 WIB Rapat Intern Komisi X DPR RI	Rapat tertutup	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																			
1	Gubernur Bank Indonesia	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 6 November 2024 dengan agenda Pengambilan Keputusan ATBI Anggaran Operasional Tahun 2025 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 2025.	<p>Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia menyetujui hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Asumsi makroekonomi yang digunakan Bank Indonesia dalam menyusun ATBI Tahun 2025 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">Pertumbuhan Ekonomi (% , y-o-y)</td> <td style="text-align: center;">5,25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">Inflasi (% , y-o-y)</td> <td style="text-align: center;">2,50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c</td> <td style="text-align: center;">Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)</td> <td style="text-align: center;">15.285</td> </tr> </table> <p>2. Berdasarkan asumsi makroekonomi Tahun 2025 yang digunakan dalam penyusunan ATBI Tahun 2025, Komisi XI DPR RI menyetujui ATBI Penerimaan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp31.497.803.615.733,00 (Tiga Puluh Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">KETERANGAN</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">NOMINAL (dalam Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan AO ATBI Tahun 2025</td> <td style="text-align: right;">31.497.803.615.733</td> </tr> <tr> <td>Hasil Pengelolaan Aset Valas</td> <td style="text-align: right;">31.401.809.980.200</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Kegiatan Kelembagaan</td> <td style="text-align: right;">15.416.678.620</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Administrasi</td> <td style="text-align: right;">80.576.956.913</td> </tr> </tbody> </table>	a	Pertumbuhan Ekonomi (% , y-o-y)	5,25%	b	Inflasi (% , y-o-y)	2,50%	c	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.285	KETERANGAN	NOMINAL (dalam Rupiah)	Penerimaan AO ATBI Tahun 2025	31.497.803.615.733	Hasil Pengelolaan Aset Valas	31.401.809.980.200	Penerimaan Kegiatan Kelembagaan	15.416.678.620	Penerimaan Administrasi	80.576.956.913	
a	Pertumbuhan Ekonomi (% , y-o-y)	5,25%																					
b	Inflasi (% , y-o-y)	2,50%																					
c	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.285																					
KETERANGAN	NOMINAL (dalam Rupiah)																						
Penerimaan AO ATBI Tahun 2025	31.497.803.615.733																						
Hasil Pengelolaan Aset Valas	31.401.809.980.200																						
Penerimaan Kegiatan Kelembagaan	15.416.678.620																						
Penerimaan Administrasi	80.576.956.913																						

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Bank Indonesia, dalam melaksanakan pengelolaan Penerimaan ATBI Operasional Tahun 2025, melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank Indonesia perlu melakukan optimalisasi dalam pencapaian penerimaan ATBI Operasional Tahun 2025 yang bersumber dari Pengelolaan Aset Valas agar konsisten dengan asumsi nilai tukar yang telah ditentukan dalam ATBI Tahun 2025; b. Perumusan dan pengelolaan Penerimaan Operasional Bank Indonesia disusun secara terukur dengan memperhatikan perkembangan kondisi keuangan global, ekonomi domestik, serta kebutuhan internal yang akan dihadapi di tahun mendatang; c. Arah kebijakan pengelolaan Penerimaan Operasional Bank Indonesia disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian Visi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional; d. Bank Indonesia dalam mengelola penerimaan operasional memperhatikan penguatan kebijakan kelembagaan yang baik dan terintegrasi untuk penguatan tata kelola, profesionalisme, dan digitalisasi dengan didukung oleh komunikasi yang efektif; dan e. Pengelolaan penerimaan aset valas sebagai sumber utama Penerimaan Operasional Bank Indonesia disusun untuk mendukung pelaksanaan efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta ditujukan untuk menjaga nilai dan kecukupan cadangan devisa serta akan terus melanjutkan transformasi kelembagaan Bank Indonesia dalam rangka menjaga sustainabilitas jumlah cadangan devisa jangka panjang. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN																								
			<p>4. Komisi XI DPR RI menyetujui ATBI Pengeluaran Operasional Tahun 2025 sebesar Rp26.657.422.334.831,00 (Dua Puluh Enam Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1016 443 1839 1107"> <thead> <tr> <th data-bbox="1016 443 1565 520">KETERANGAN</th> <th data-bbox="1565 443 1839 520">NOMINAL (dalam Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1016 520 1565 560">Pengeluaran AO ATBI Tahun 2025</td> <td data-bbox="1565 520 1839 560">26.657.422.334.831</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 560 1565 600">1) Gaji dan Penghasilan Lainnya</td> <td data-bbox="1565 560 1839 600">5.685.514.835.920</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 600 1565 639">2) Manajemen Sumber Daya Manusia</td> <td data-bbox="1565 600 1839 639">8.661.543.020.360</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 639 1565 679">3) Layanan Sarana dan Prasarana</td> <td data-bbox="1565 639 1839 679">2.650.267.512.942</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 679 1565 751">4) Perumusan dan Pelaksanaan Kelembagaan</td> <td data-bbox="1565 679 1839 751">2.535.442.675.130</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 751 1565 791">5) Operasionalisasi Kebijakan Utama</td> <td data-bbox="1565 751 1839 791">2.030.132.154.565</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 791 1565 863">6) Pemberdayaan UMKM, Stabilisasi Harga dan Akseptasi Digitalisasi</td> <td data-bbox="1565 791 1839 863">673.661.171.879</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 863 1565 935">7) Pelaksanaan Supervisi Bank Indonesia</td> <td data-bbox="1565 863 1839 935">50.000.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 935 1565 1007">8) Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</td> <td data-bbox="1565 935 1839 1007">741.358.476.016</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1007 1565 1046">9) Pajak</td> <td data-bbox="1565 1007 1839 1046">2.979.321.455.462</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1046 1565 1107">10) Cadangan Anggaran</td> <td data-bbox="1565 1046 1839 1107">650.181.032.557</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Bank Indonesia menyampaikan pelaksanaan penggunaan anggaran DAPENBI kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>6. Dalam mencapai arah kebijakan ATBI Tahun 2025, Bank Indonesia akan melaksanakan 12 Program Strategis (dengan 40 Indikator Kinerja Utamanya (IKU) sebagaimana dalam dokumen Panja Pengeluaran tanggal 6 dan 7 November 2024), yaitu:</p>	KETERANGAN	NOMINAL (dalam Rupiah)	Pengeluaran AO ATBI Tahun 2025	26.657.422.334.831	1) Gaji dan Penghasilan Lainnya	5.685.514.835.920	2) Manajemen Sumber Daya Manusia	8.661.543.020.360	3) Layanan Sarana dan Prasarana	2.650.267.512.942	4) Perumusan dan Pelaksanaan Kelembagaan	2.535.442.675.130	5) Operasionalisasi Kebijakan Utama	2.030.132.154.565	6) Pemberdayaan UMKM, Stabilisasi Harga dan Akseptasi Digitalisasi	673.661.171.879	7) Pelaksanaan Supervisi Bank Indonesia	50.000.000.000	8) Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	741.358.476.016	9) Pajak	2.979.321.455.462	10) Cadangan Anggaran	650.181.032.557	
KETERANGAN	NOMINAL (dalam Rupiah)																											
Pengeluaran AO ATBI Tahun 2025	26.657.422.334.831																											
1) Gaji dan Penghasilan Lainnya	5.685.514.835.920																											
2) Manajemen Sumber Daya Manusia	8.661.543.020.360																											
3) Layanan Sarana dan Prasarana	2.650.267.512.942																											
4) Perumusan dan Pelaksanaan Kelembagaan	2.535.442.675.130																											
5) Operasionalisasi Kebijakan Utama	2.030.132.154.565																											
6) Pemberdayaan UMKM, Stabilisasi Harga dan Akseptasi Digitalisasi	673.661.171.879																											
7) Pelaksanaan Supervisi Bank Indonesia	50.000.000.000																											
8) Program Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	741.358.476.016																											
9) Pajak	2.979.321.455.462																											
10) Cadangan Anggaran	650.181.032.557																											

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; b. Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; d. Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; e. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta perlindungan konsumen, untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; f. Memperkuat sinergi kebijakan, pengawasan, dan perlindungan konsumen antara Bank Indonesia dan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; g. Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang, dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi; h. Merumuskan kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau baik secara konvensional 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>maupun berdasarkan prinsip syariah serta memperkuat sinergi dan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerja sama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan Pemerintah dan Otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; j. Merumuskan dan implementasi bauran kebijakan kelembagaan dengan kepemimpinan profesional dan tata kelola yang baik untuk mencapai kinerja unggul; k. Merumuskan dan implementasi kebijakan komunikasi dan pengaturan hukum untuk memperkuat stabilitas, transparansi, kredibilitas Bank Indonesia; l. Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola aset fisik dan aset sistem informasi yang terintegrasi dengan pengadaan dan pengelolaan program untuk mendukung pencapaian kinerja kelembagaan optimal; <p>Bank Indonesia dalam menjalankan 12 Program Strategis dilaksanakan dengan kinerja yang terukur, efisien, efektif, dan <i>good governance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> 7. Bank Indonesia dalam menjalankan ATBI Tahun 2025, memperkuat kebijakan dan program-program yang terkait dengan hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pembangunan digitalisasi yang lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna; b. Peran Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diwujudkan melalui program-program dan kegiatan yang sistematis dan terukur; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN														
			<p>c. Kebijakan Makroprudensial berkontribusi dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, pada sektor-sektor strategis termasuk pangan.</p> <p>8. Bank Indonesia mempertajam IKU-IKU yang berkaitan dengan: Pendalaman Pasar Uang, Valuta Asing, Pertumbuhan ekonomi, Transaksi QRIS, Penerbitan Peraturan Perundang-undangan, Perkembangan Ekonomi Keuangan Syariah.</p> <p>9. Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Bank Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp8.160.934.189.194,00 (Delapan Triliun Seratus Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1016 740 1843 1209"> <thead> <tr> <th data-bbox="1016 740 1525 820">KETERANGAN</th> <th data-bbox="1525 740 1843 820">NOMINAL (dalam Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1016 820 1525 900">Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan Tahun 2025</td> <td data-bbox="1525 820 1843 900">8.160.934.189.194</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 900 1525 1011">A. Penggantian dan/atau Pembaruan Harta Tetap dan Pengadaan Perlengkapan</td> <td data-bbox="1525 900 1843 1011">6.349.556.184.711</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1011 1525 1051">B. Peningkatan Kualitas Teknologi</td> <td data-bbox="1525 1011 1843 1051">1.191.247.948.712</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1051 1525 1131">C. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi</td> <td data-bbox="1525 1051 1843 1131">101.514.142.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1131 1525 1171">D. Penyertaan Modal</td> <td data-bbox="1525 1131 1843 1171">130.000.000.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1016 1171 1525 1209">E. Cadangan</td> <td data-bbox="1525 1171 1843 1209">388.615.913.771</td> </tr> </tbody> </table> <p>10. Bank Indonesia menyampaikan <i>roadmap</i>/rencana induk (5 tahun ke depan) dalam pengembangan: Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi formasi efektif Bank Indonesia, dan <i>roadmap</i> Peningkatan kualitas teknologi, dan inovasi digital.</p>	KETERANGAN	NOMINAL (dalam Rupiah)	Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan Tahun 2025	8.160.934.189.194	A. Penggantian dan/atau Pembaruan Harta Tetap dan Pengadaan Perlengkapan	6.349.556.184.711	B. Peningkatan Kualitas Teknologi	1.191.247.948.712	C. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	101.514.142.000	D. Penyertaan Modal	130.000.000.000	E. Cadangan	388.615.913.771	
KETERANGAN	NOMINAL (dalam Rupiah)																	
Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan Tahun 2025	8.160.934.189.194																	
A. Penggantian dan/atau Pembaruan Harta Tetap dan Pengadaan Perlengkapan	6.349.556.184.711																	
B. Peningkatan Kualitas Teknologi	1.191.247.948.712																	
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	101.514.142.000																	
D. Penyertaan Modal	130.000.000.000																	
E. Cadangan	388.615.913.771																	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>11. Bank Indonesia menyampaikan pelaksanaan Penyertaan Modal pada Nexus kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>12. Rencana Penggunaan Cadangan Anggaran pada Anggaran Operasional sebesar Rp650.181.032.557,00 (<i>Enam ratus lima puluh miliar seratus delapan puluh satu juta tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah</i>) dan pada Cadangan Tujuan sebesar Rp388.615.913.771,00 (<i>Tiga ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah</i>) tahun anggaran berjalan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan melalui Rapat Kerja. Apabila Rapat Kerja tersebut belum dapat dilaksanakan selambat lambatnya 30 hari kerja dari permohonan Rapat Kerja, maka Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah penggunaan Cadangan Anggaran dan dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI.</p> <p>13. Pelaksanaan kenaikan gaji dan penghasilan lainnya sebesar 6% dibahas lebih lanjut bersamaan Laporan Capaian Kinerja DG dan ADG Triwulan III Tahun 2024.</p> <p>14. Bank Indonesia menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur Triwulan III 2024 paling lambat pada tanggal 31 Januari 2025.</p> <p>15. Bank Indonesia menyampaikan Dokumen RATBI Pengeluaran Operasional dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPCT) Tahun 2025, yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil pembahasan Panja Pengeluaran Komisi XI DPR RI pada tanggal 6 dan 7 November 2024, paling lambat pada tanggal 31 Januari 2025.</p>	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Keuangan	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 13 November 2024 membahas Kinerja Kementerian Keuangan Triwulan III Tahun 2024.	<p>Komisi XI RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Menteri Keuangan mengenai Kinerja Kementerian Keuangan Triwulan III Tahun 2024. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi Kementerian Keuangan atas capaian realisasi pengelolaan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara, yang tetap berada dalam batas-batas UU APBN Tahun 2024. 3. Menteri Keuangan akan memperhatikan kinerja dan tindak lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengimplementasikan kebijakan fiskal yang memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; 2) Menyampaikan program yang terukur bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen kepada Komisi XI DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025; 3) Menyampaikan program yang terukur pencapaian <i>tax ratio</i> 5 tahun kedepan kepada Komisi XI DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025; 4) Menyampaikan program yang terukur Reformasi Perpajakan sebagai implementasi UU HPP kepada Komisi XI DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025; 5) Menyampaikan strategi Pemerintah melakukan pengelolaan utang jatuh tempo periode tahun 2025 – 2029; 6) Memperkuat kebijakan pelaksanaan Transfer Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah; 7) Mengimplementasikan hal-hal berikut pada tahun anggaran 2025: standarisasi <i>output</i> dan keluaran Belanja K/L; Penajaman nomenklatur K/L; <i>Logical Framework</i> pada belanja-belanja K/L; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Reward and punishment</i> K/L yang dikaitkan dengan capaian Indikator Pembangunan Nasional.</p> <p>8) Pembahasan mekanisme persetujuan Kredit Ekspor bersama Komisi XI DPR RI;</p> <p>9) Memperkuat kebijakan untuk melaksanakan Anggaran Pendidikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sesuai amanat UUD NRI 1945;</p> <p>10) Menyampaikan kajian BPI Danantara yang mencakup Visi, Misi, Kelembagaan, <i>Outcome</i>, dan dampaknya kepada Komisi XI DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025.</p> <p>4. Menteri Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
2	<p>Pelaksana Harian Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Plh. Kepala LKPP)</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 18 November 2024 membahas Kinerja LKPP Triwulan III Tahun 2024</p>	<p>Komisi XI DPR RI dan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Plh. Kepala LKPP mengenai Kinerja LKPP Triwulan III Tahun 2024. 2. Komisi XI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran LKPP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp34,20 miliar dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp30,77 miliar; b) Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebesar Rp3,43 miliar. <p>Untuk diusulkan dan disesuaikan dengan ruang fiskal APBN Tahun Anggaran 2025.</p> 3. LKPP dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada sisa Tahun Anggaran 2024, akan diarahkan untuk: 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a) Memperkuat kebijakan, pelaksanaan, dan sosialisasi dalam rangka penguatan regulasi, transformasi digital, penguatan kompetensi sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, pelaksanaan konsolidasi, mekanisme pengaduan, dan pendampingan <i>stakeholder</i> pengadaan barang dan jasa pemerintah;</p> <p>b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap transaksi di aplikasi e-katalog guna memastikan kualitas produk yang layak tayang dan memitigasi kecurangan pengadaan barang dan jasa pemerintah;</p> <p>c) Memperkuat kebijakan, pelaksanaan, dan sosialisasi utamanya dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan keterlibatan Usaha Mikro Kecil serta Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.</p> <p>4. LKPP dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Tahun Anggaran 2025 akan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan <i>multiplier effect</i> terhadap perekonomian nasional.</p> <p>5. Komisi XI DPR RI akan menjadwalkan rapat dengan LKPP untuk membahas SPSE.</p> <p>6. Plh. Kepala LKPP akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
3	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK)	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 18 November 2024 membahas Kinerja OJK Triwulan III Tahun 2024.	<p>Komisi XI DPR RI dan Ketua DK OJK menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK tentang Laporan Triwulan III Tahun 2024. 2. OJK harus meningkatkan kinerja sehingga target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan realisasi anggaran Tahun 2024 dapat terpenuhi. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. OJK harus melakukan audit organisasi tata kelola, penempatan SDM dan keuangan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. 4. OJK memastikan realisasi Program Kerja Manajemen Strategis yang akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024 antara lain Pengadaan Aset, Pengelolaan <i>Software</i>, Layanan Data Informasi OJK <i>Wide</i> dan pelunasan kewajiban perpajakan, agar berjalan sesuai dengan <i>time schedule</i> yang telah ditentukan. 5. OJK merespon secara cepat, tepat, dan simpatik atas setiap aduan dari masyarakat atas permasalahan di Sektor Jasa Keuangan serta terus memperluas edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. 6. OJK mempersiapkan rencana strategis sebagai tindak lanjut pemberantasan praktik Judi <i>Online</i> yang berkaitan kepada Sektor Jasa Keuangan. 7. Komisi XI DPR RI bersama OJK mendorong agar Peraturan Pemerintah yang terkait keuangan derivatif dan aset kripto segera diterbitkan sebelum 12 Januari 2025. 8. OJK melalui Satgas PASTI harus tegas menghentikan aktivitas Pinjaman Online Ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat dan membawa dampak negatif bagi perekonomian nasional. 9. OJK akan membahas program terukur untuk mewujudkan Peta Jalan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028, pada forum Rapat Kerja selanjutnya. 10. OJK mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pasar karbon yang akuntabel dan terpercaya sesuai dengan amanat UU PPSK. 11. OJK perlu mempersiapkan strategi pencegahan dan penyelesaian terkait dengan pelanggaran/kejahatan pasar modal. 12. OJK melakukan koordinasi dengan Otoritas/Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI beserta asosiasi industri terkait 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>untuk membangun forum koordinasi dalam menangani praktik penipuan (<i>scam</i>) di sektor keuangan (<i>Indonesia Anti-Scam Centre</i>) yang berlandaskan keberpihakan terhadap konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>13. OJK akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
4	Rapat Internal	Rapat dilaksanakan tanggal 18 November 2024 membahas Usulan Penambahan RUU Prioritas Tahun 2025.	Tertutup.	
5	PT. Geo Dipa Energi (Persero), PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	<p>Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 19 November 2024 membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja Triwulan III Tahun 2024 bagi PT. Geo Dipa Energi (Persero), PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); 2) Kinerja dan Progres implementasi pelaksanaan PMN TA 2024 bagi Lembaga 	<p>Komisi XI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (Persero), Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero), Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero), dan Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero) menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (Persero), Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero), Direktur Utama PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero), Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero) mengenai Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan penjelasan dari Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengenai Progres Implementasi Pelaksanaan PMN Tahun Anggaran 2024. 2. PT. Geo Dipa Energi (Persero) meningkatkan kinerja dalam: <ol style="list-style-type: none"> a) Penguatan kapasitas produksi dan eksplorasi melalui investasi terhadap riset, inovasi dan teknologi untuk mengakselerasi pengembangan energi bersih tanpa emisi karbon guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi energi baru terbarukan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Pembiayaan Ekspor Indonesia.	b) Pengelolaan kinerja perusahaan yang optimal, pengelolaan investasi berkelanjutan, bermitigasi risiko, dengan menerapkan prinsip <i>environment and social governance</i> dan meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan dan dividen. 3. PT. SMI (Persero) meningkatkan kinerja dalam: a) Pelaksanakan inovasi pembiayaan infrastruktur, diversifikasi pembiayaan di luar sektor infrastruktur dan penguatan kapasitas riset dalam rangka menjadi katalis pembiayaan pembangunan nasional; b) Pengelolaan kinerja keuangan yang optimal, berkelanjutan, bermitigasi risiko, dan meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan dan dividen; c) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur daerah utamanya daerah timur Indonesia melalui skema pembiayaan yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah. 4. LPEI meningkatkan kinerja dalam; a) Memastikan terlaksananya penyaluran pembiayaan LPEI yang berkualitas melalui perbaikan bisnis model dan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip serta penguatan <i>Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i> untuk menyehatkan kinerja keuangan; b) Memastikan pelaksanaan Program Khusus Ekspor (PKE) dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai devisa; c) Memperkuat ekosistem ekspor melalui peningkatan proporsi jumlah UMKM, peningkatan daya saing, dan peningkatan kapasitas eksportir produk-produk strategis nasional; d) Penyelesaian aset bermasalah diarahkan untuk memulihkan potensi dan/atau kerugian negara, serta kualitas aset yang berkualitas paling lambat pada akhir Tahun 2027 dan melaporkan progres setiap tahunnya kepada Komisi XI DPR RI;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>e) Membuat rencana unit usaha Syariah.</p> <p>5. PT. SMF (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <p>a) Memperkuat pembiayaan sekunder perumahan yang ditunjukan dengan penyediaan pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan memberikan <i>multiplier effect</i> pada sektor riil;</p> <p>b) Pengelolaan kinerja keuangan yang optimal, berkelanjutan, bermitigasi risiko, dan meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan dan dividen;</p> <p>c) Memperkuat sinergi dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> ekosistem perumahan nasional.</p> <p>6. PT. PII (Persero) meningkatkan kinerja dalam:</p> <p>a) Memperkuat peran dalam melaksanakan penjaminan pembangunan yang berkelanjutan yang ditunjukan dengan peningkatan kapabilitas, kapasitas organisasi, dan kualitas sumber daya manusia guna mendukung program-program pemerintah dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan dan sosial;</p> <p>b) Meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan kontribusi kepada negara melalui pajak dan dividen;</p> <p>c) Meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memperluas jangkauan penjaminan di luar proyek infrastruktur.</p> <p>7. PT. Geo Dipa Energi (Persero), PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero), dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero) akan memberikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 kepada Komisi XI DPR RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>8. Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (Persero), Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero), Direktur Eksekutif Lembaga</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Persero), dan Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero) jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.	
6	Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (Ketua DK LPS)	Rapat kerja dilaksanakan tanggal 20 November 2024 membahas Kinerja LPS Triwulan III Tahun 2024.	Komisi XI DPR RI dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menyepakati hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua DK LPS tentang Evaluasi Kinerja Lembaga Penjamin Simpanan Triwulan III Tahun 2024. 2. Komisi XI DPR RI mengapresiasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang LPS dalam upaya mencapai Kinerja Kelembagaan LPS pada Tahun 2024. 3. LPS dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Bank, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Resolusi dilaksanakan dengan tata kelola dengan prinsip <i>good corporate governance</i>, profesional, dan taat pada ketentuan peraturan; b. Resolusi dilaksanakan dengan tetap menjaga kondisi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. 4. LPS dalam mengelola investasi aset LPS dilaksanakan dengan memperhatikan likuiditas aset LPS dan mitigasi risiko. 5. LPS meningkatkan kinerja kualitas pelayanan dan waktu pembayaran klaim penjaminan simpanan. 6. LPS mengkaji secara mendalam peluang menaikkan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank dengan nilai di atas Rp2 miliar disampaikan kepada Komisi XI DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025. 7. LPS mempertajam <i>Road map</i> Penjaminan Polis Asuransi; antara lain: kriteria calon peserta program penjaminan polis, skema penjaminan 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>polis, jenis polis asuransi dan batas maksimum nilai yang dijamin; dan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025.</p> <p>8. LPS melaksanakan monitoring terhadap kepatuhan Bank Digital untuk menyampaikan informasi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).</p> <p>9. LPS menyempurnakan dan melengkapi Laporan Kelembagaan LPS sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dalam Pasal 7 Angka 58 UU P2SK, yang meliputi: pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang LPS, kinerja program dan indikator kinerja utama LPS, capaian kinerja Dewan Komisioner dan Anggota Dewan Komisioner, dan pelaksanaan anggaran tahunan. Penyempurnaan tersebut sudah diimplementasikan pada laporan tahunan 2024.</p> <p>10. Ketua DK LPS akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
7	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	Rapat konsultasi dilaksanakan tanggal 2 Desember 2024 membahas Pembahasan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2024	<p>Komisi XI DPR RI bersama dengan BPK RI menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI dapat menerima penjelasan dari BPK RI mengenai Pembahasan Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2024. 2. Komisi XI DPR RI akan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas K/L mitra Komisi XI DPR RI. 3. Komisi XI DPR RI mengapresiasi upaya BPK RI melalui hasil pemeriksaannya memberikan dampak peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian dan lembaga. 4. BPK RI terus mempertajam pemeriksaannya pada upaya meningkatkan kualitas audit, penyelamatan keuangan negara, perbaikan tata kelola keuangan negara, kerangka kerja logis (<i>logical framework</i>) pelaksanaan program-program K/L, amanat dalam 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Undang-Undang APBN TA 2024, serta kepatuhan entitas dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. 5. BPK RI meningkatkan kualitas audit dalam memberikan opini WTP, dan lebih memperhatikan konsistensi pada target yang ditetapkan dan diatur di Undang-Undang APBN TA 2024.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024, pukul 10.00 WIB.	Penjelasan terkait tujuan, sasaran, dan mekanisme Panitia Kerja.	
2.	Menteri ESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	1. Perkenalan. 2. Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024. 3. Rencana Program Kerja 100 hari. 4. Program Strategis Tahun 2025. 5. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024, pukul 14.00 WIB.		
3.	Dirut PT Pertamina Patra Niaga	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP Panja Migas dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024, pukul 16.00 WIB.	Pendalaman sistem dan tata laksana penyaluran BBM dan LPG 3 Kg bersubsidi.	
4.	Kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 15-17 November 2024.	1. PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) di Balikpapan, Proinsi Kalimantan Timur. 2. <i>Smelter Freeport</i> di Gresik Provinsi Jawa Timur. 3. PLN UID di Denpasar Provinsi Bali.	
5.	Kepala BPH Migas	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024, pukul 10.00 WIB.	1. Perkenalan. 2. Progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024. 3. Program stratehis Tahun 2025. 4. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Kepala SKK Migas	1. Pelaksanaan undang-undang; 2. Pelaksanaan keuangan negara; 3. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024, pukul 13.00 WIB.	1. Perkenalan. 2. Progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024. 3. Program strategis Tahun 2025. 4. Lain-lain.	
7.	Kepala BIG	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024, pukul 13.00 WIB.	1. Perkenalan. 2. Progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024. 3. Program strategis Tahun 2025. 4. Lain-lain.	
8.	Kepala BAPETEN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024, pukul 10.00 WIB.	1. Perkenalan. 2. Progres dan evaluasi pelaksanaan program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024. 3. Program strategis Tahun 2025. 4. Lain-lain.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	Kunjungan kerja spesifik panja Minerba	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 29 November – 1 Desember 2024.	1. Kunjungan Kerja Spesifik Panja Minerba ke Provinsi Riau 2. Kunjungan Kerja Spesifik Panja Minerba Komisi XII ke Provinsi Jawa Timur	
10.	Dewan Energi Nasional	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.	1. Perkenalan. 2. Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024. 3. Program Strategis Tahun 2025. 4. Lain-lain.	
11.	Dirut PT PLN (Persero) dengan menghadirkan seluruh sub-holding	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 2 Desember, pukul 13.00 WIB.	1. Perkenalan. 2. Realisasi program prioritas Tahun 2024. 3. Program prioritas Tahun 2025. 4. Lain-lain.	
12.	Menteri Investasi Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan	1. Perkenalan. 2. Progres dan Evaluasi Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-3 Tahun 2024.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		negara; c. Kebijakan Pemerintah. Raker dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 13.00 WIB.	3. Rencana Program Kerja 100 hari. 4. Program Strategis Tahun 2025. 5. Lain-lain.	
13.	RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan RDPU dengan Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial (IWIP)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dan RDPU dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 WIB.	Pasokan ORE untuk <i>Weda Bay</i> .	
14.	Dirut MIND ID dan menghadirkan seluruh sub <i>holding</i>	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 10.00 WIB.	1. Perkenalan 2. Progres dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Tahun 2024 3. Program prioritas Tahun 2025 4. Lain-lain.	
15.	Anggota DPRD Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan	Kosultasi/koordinasi terkait pembangunan jaringan listrik pemukiman dusun terpencil di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.	

Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 - 2025
(13 November – 5 Desember 2024)

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat Audiensi dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 13.30 WIB.		

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri Sekretaris Negara	Raker dilaksanakan pada 13 November 2024, pukul 10.00 WIB.	<ol style="list-style-type: none">Perkenalan Anggota Komisi XIII dan Jajaran Kementerian Sekretaris Negara.Penyampaian sekilas tentang kelembagaan Kementerian Sekretaris Negara.	
2.	Rutan Salemba	Kunjungan Pimpinan dan Anggota Komisi XIII DPR RI (Sidak) dilaksanakan pada 14 November 2024, pukul 09.00 WIB.		

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU/INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025	Rapat Badan Legislasi, Senin, 18 November 2024 pukul 10.10 WIB dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.	Menyetujui/menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan Tim Ahli untuk mempertimbangkan/mengakomodir masukan-masukan yang disampaikan oleh Anggota Baleg; • Daftar Prolegnas usulan DPR akan menjadi bahan dalam penyusunan Prolegnas pada Rapat Kerja dengan Pemerintah dan PPUU DPD RI. 	
2.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Rapat Kerja Badan Legislasi, Senin, 18 November 2024 pukul 10.40 WIB dalam rangka Pembahasan RUU.	Menyetujui/menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPD RI sebanyak 34 (tiga puluh empat) DIM dengan rincian 33 DIM bersifat Tetap dan 1 DIM bersifat Substansi. ▪ DIM bersifat Tetap telah disetujui dan disepakati, sedangkan DIM bersifat Substansi akan dibahas secara lebih intensif dalam Rapat Panja. ▪ Rapat Panja akan dilaksanakan pada hari Senin, 18 November 2024 pukul 13.00 WIB. 	
3.	Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025	Rapat Kerja Badan Legislasi, Senin, 18 November 2024 pukul 11.20 WIB dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.	Menyetujui/menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan Tim Ahli untuk menyempurnakan Daftar Usulan Prolegnas RUU Tahun 2025--2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh Menteri Hukum, Anggota Baleg, dan Pimpinan PPUU DPD RI. • Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas akan dibahas lebih mendalam pada Rapat Panja. 	

NO	JUDUL RUU/INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Rapat Panja Badan Legislasi, Senin, 18 November 2024 pukul 13.24 WIB dalam rangka Pembahasan DIM RUU.	Menyetujui/menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> • DIM Nomor 1 terdapat perubahan substansi yaitu menambah ayat (2) pada pasal 22D yang lebih menekankan keterlibatan DPD dalam membahas rancangan undang-undang terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. • Panja akan melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Kerja yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 pukul 19.30 WIB 	
5.	Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025	Rapat Panja Badan Legislasi, Senin, 18 November 2024 pukul 14.23 WIB dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.	Menyetujui/menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> • 41 RUU dan 5 RUU Kumulatif, serta 176 RUU dalam Prolegnas 2025-2029 dan 5 RUU Kumulatif Terbuka. • Panja akan melaporkan hasil penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 pada rapat kerja yang dijadwalkan hari Senin, 18 November 2024 pukul 19.30 WIB. 	
6.	RUU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025	Rapat Kerja Badan Legislasi, Senin, 18 November 2024 pukul 14.23 WIB dalam rangka Pembahasan RUU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.	Menyetujui/menyepakati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima laporan Ketua Panja pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan laporan Ketua Panja penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025--2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. ▪ Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	

NO	JUDUL RUU/INSTANSI	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025--2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
7.	Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK)	Audiensi Badan Legislasi, Rabu, 4 Desember 2024 pukul 10.53 WIB dalam rangka mendengarkan Pandangan/Masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) dalam Prolegnas.	Menyetujui/menyepakati: Audiensi Badan Legislasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dan kesiapan PPATK dalam menyiapkan bahan materi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	FGD BKSAP “Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era ke-2 Presiden Donald Trump” dilaksanakan pada 13 November 2024.	<p>BKSAP DPR RI mengadakan FGD membahas “Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era ke-2 Presiden Donald Trump” pada hari Rabu (13/11/2024) di Ruang Diplomasi Parlemen, Gedung Nus III Lt.2.</p> <p>Kegiatan FGD yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP, Bramantyo Suwondo (F-PD) diadakan guna membahas proyeksi kebijakan luar negeri AS dan dampaknya terhadap Indonesia. Dibahas pula berbagai potensi penguatan hubungan antara Indonesia – AS pada berbagai bidang.</p> <p>Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan dan anggota BKSAP serta Staf Ahli Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Adam M. Tugio dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Pertamina, Dr. Ian Montratama.</p>	
2.	KSI - BKSAP	Menghadiri <i>Parliamentary meeting on the Occassion of the 29th United Nations Climate Change Conference (COP29)</i> di Baku, Azerbaijan dilaksanakan pada 16-17 November 2024.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (F-PGolkar), dan Anggota BKSAP DPR RI, Rahayu Sarawati Djojohadikusumo (F-PGerindra), menghadiri <i>Parliamentary meeting on the Occasion of the 29th United Nations Climate Change Conference (COP29)</i> di Baku, Azerbaijan pada tanggal 16-17 November 2024.</p> <p>Pada sesi pertama, Sabtu (16/11) Mardani menyampaikan peran DPR dalam penanganan perubahan iklim. Bahkan, jauh sebelum Kesepakatan Paris 2015, DPR RI sudah sangat memerhatikan urgensi penanganan iklim dan lingkungan yaitu dengan mengadopsi UU Kehutanan untuk keberlangsungan hutan pada tahun 1999.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Sedikitnya ada delapan undang-undang yang diadopsi DPR yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan penanganan iklim. Antara lain UU Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan yang di dalam membahas ihwal pajak karbon.</p> <p>Pada sisi lain ditegaskan komitmen Indonesia untuk menyampaikan NDC terbaru dengan target yang lebih ambisius yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan upaya sendiri sebesar 31,89 persen dan dengan dukungan internasional sebesar 43,2 persen pada tahun 2030. Angka ini meningkat dari target NDC sebelumnya sebesar 29 persen dan 41 persen.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga juga menyampaikan dalam intervensinya yang mengingatkan bahwa negara-negara berkembang cenderung menjadi yang paling merasakan dampak negatif dari perubahan iklim.</p> <p>Dari segi kontribusi tercatat 79 persen dari emisi CO2 secara historis berasal dari segelintir negara-negara maju. Oleh karena itu, komitmen pendanaan iklim dari negara-negara maju yang dinaungi UNFCCC menjadi suatu hal yang penting untuk digaungkan dan dilaksanakan. Mengutip data dari <i>Postdam Institute of Climate Change</i>, Ravindra menyampaikan bahwa kerugian per tahun yang disebabkan oleh perubahan iklim akan mencapai hampir setengah dari PDB Dunia pada tahun 2050.</p> <p>Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia pada 2021 berdasarkan <i>Global Climate Atlas</i> berkontribusi 1.7% dari total emisi. Meski demikian, Indonesia di COP29 teguh berkomitmen dengan <i>Nationally</i></p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>Determined Contribution</i>, yakni untuk mengurangi emisi sebesar 31,89 persen dengan swadaya dan penurunan sebesar 43,2 persen dengan bantuan pendanaan internasional.</p> <p>Dijelaskan Ravindra, bantuan pendanaan perubahan iklim yang dicanangkan pada <i>New Collective Quantified Goal</i> harus lebih merefleksikan <i>'true cost'</i> untuk mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim dunia dengan proyeksi angka 5,7 sampai 5,8 triliun dollar Amerika per tahun.</p> <p>Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Rahayu Saraswati juga mengajak anggota parlemen dunia untuk melakukan langkah nyata sebagai kerangka adaptasi atas perubahan iklim.</p> <p>Adapun langkah nyata yang disampaikannya dalam forum tersebut diantaranya, mendorong pendidikan dan pelatihan warga lokal sehingga memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan iklim secara berkelanjutan.</p> <p>Kedua, parlemen harus memastikan pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif. Terkait inklusifitas, ia mengingatkan ihwal keterwakilan perempuan, kelompok penyandang disabilitas, dan masyarakat adat (<i>indigenous people</i>) di parlemen.</p> <p>Ketiga, mendorong parlemen global untuk terus meningkatkan dan mempererat bekerja sama di segala bidang.</p> <p>Diingatkan pula bahwa instrumen-instrumen keuangan inovatif harus dipersiapkan seperti <i>'climate resilient debt clause'</i> <i>'loss and damage fund'</i>, <i>'carbon credit financing'</i> dan bagaimana cara agar sektor publik memiliki insentif untuk membantu mitigasi iklim.</p> <p>Demikian pula ekosistem sebagai sebuah layanan (<i>Ecosystem as a Service</i>) juga harus diperhatikan dan pasar global atas hal tersebut harus dikembangkan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	KSB - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Kepala Departemen Asia-Pasifik, Mr. Mirco Gunther dilaksanakan pada 20 November 2024.	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga B.A., M.S. menerima Kepala Departemen Asia-Pasifik Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Berlin, Mr. Mirco Gunther pada hari Rabu (20/11/2024) di R. Pimpinan BKSAP, Gedung Nus. III Lt.2.</p> <p>Pertemuan mendiskusikan peluang kerja sama strategis dalam meningkatkan kapasitas staf parlemen, mendorong inklusi sosial dan gender, serta memperkuat upaya anti-korupsi di tingkat regional. Dalam wawancara se usai pertemuan, Ravindra menyoroti pentingnya pelatihan untuk staf pendukung parlemen dan pertukaran antarpellemen guna memperkaya perspektif kebijakan, khususnya di kalangan anggota parlemen muda. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong penguatan demokrasi, keadilan sosial, dan pembangunan yang inklusif, baik di Indonesia maupun kawasan Asia-Pasifik. Melalui komitmen bersama, DPR RI dan FES berupaya merancang <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> baru untuk menjawab tantangan global, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, populasi lanjut usia, dan keberlanjutan sistem keamanan sosial.</p>	
4.	BKSAP	Pembukaan “Solidaritas Parlemen Indonesia untuk Palestina dilaksanakan pada 20 November 2024.	<p>Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) membuka kegiatan "Solidaritas Parlemen Indonesia untuk Palestina" pada hari Rabu (20/11/2024).</p> <p>Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Pekan Solidaritas Palestina yang diadakan oleh BKSAP DPR RI pada tanggal 20 - 29 November 2024. Selain adanya Bazaar UMKM yang hasil penjualannya akan disumbangkan ke Palestina, BKSAP juga akan mengadakan Lari Bersama, Solidaritas untuk Palestina pada tanggal 22 November 2024, FGD Palestina pada tanggal 29 November 2024 serta Booth Donasi Pakaian pada 20-29 November 2024.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Pimpinan BKSAP – Dubes RRT untuk Indonesia dilaksanakan pada 20 November 2024.	<p>Pimpinan BKSAP DPR RI menerima Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, H.E. Mr. Wang Lutong pada hari Rabu (20/11/2024) di Ruang Pimpinan BKSAP DPR RI, Gedung Nusantara III Lt.2.</p> <p>Dalam pertemuan perkenalan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera memaparkan fungsi dan tugas BKSAP DPR RI sebagai ujung tombak diplomasi parlemen DPR RI. Ketua BKSAP DPR RI juga menyampaikan apresiasinya atas kerja sama bilateral kedua negara khususnya pada bidang perdagangan dan investasi. Duta Besar RRT, H.E. Mr. Wang Lutong menyatakan pentingnya memperkuat kerja sama hubungan kedua negara termasuk di tingkat parlemen. Dalam hal ini, Dubes RRT menyampaikan perlunya lebih banyak pertukaran kunjungan untuk mendiskusikan berbagai hal yang menjadi kepentingan bersama. Kedua pihak juga sepakat bahwa dalam mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara, hubungan antar-masyarakat perlu semakin ditingkatkan. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RRT juga menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok.</p>	
6.	KSB - BKSAP	Sosialisasi Diplomasi Parlemen & Politik Luar Negeri RI dilaksanakan pada 21 November 2024.	<p>BKSAP DPR RI mengadakan Sosialisasi Diplomasi Parlemen & Politik Luar Negeri RI di Universitas Indonesia (21/11/24). Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, BKSAP DPR sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) selama lima tahun dengan tagline berdaya, berdampak dan berpengaruh agar efektifitas dalam diplomasi antar parlemen bisa optimal.</p> <p>“Untuk berdaya kita harus punya kekuatan, untuk berdampak kita harus memberikan sesuatu untuk berpengaruh kontennya harus kuat dan karena itu berbagai hal akan kita lakukan. Karena itu hari ini kita datang</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dalam rangka eksplorasi dan peluang kolaborasi, dan alhamdulillah ternyata banyak sekali dapat masukannya” ujar Mardani saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BKSAP mengunjungi Kampus FISIP UI di Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11).</p> <p>Menurut Mardani, secara konten diplomasi antar parlemen yang dilakukan adalah non <i>binding</i> diplomasi, namun walaupun non <i>binding</i> tetapi politically binding. Jadi secara politik sebenarnya mengikat dan berikutnya yang terjadi tim BKSAP harus menjadi pelopor misalnya pada wilayah <i>South-South Cooperation</i> (SSC) dengan bermaksud menjaga eksistensi negara Palestina.</p>	
7.	KSB - BKSAP	<i>Solidarity Run for Palestine</i> dilaksanakan pada 22 November 2024.	<p>Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Jumat (22/11/2024), mengadakan Lari Bersama sebagai ungkapan Solidaritas Parlemen Indonesia untuk Palestina.</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera, dalam sambutannya menekankan pentingnya dukungan parlemen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. "Niat yang baik dari kita semua, kumpul bersama untuk solidaritas. Kita gelorakan kemerdekaan Palestina. <i>Free, free Palestine!</i> Indonesia untuk Palestina!" ujar Mardani di hadapan ratusan peserta yang ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan ramainya aksi sosial bela Palestina seperti hari ini, besar harapan menguatnya dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya solidaritas bagi perjuangan Palestina.</p>	
8.	KSI - BKSAP	Menghadiri Sidang <i>11th Plenary Session of International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP)</i> , di Phnom Penh,	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra) dan Anggota BKSAP DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia (F-PGrindra) dan Amelia Anggraini (F-PNasDem) menghadiri sidang <i>11th Plenary Session of International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP)</i> , di Phnom Penh, Kamboja.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p><i>Kamboja</i> dilaksanakan pada 23-26 November 2024.</p>	<p>Mengusung tema “<i>A Quest For Peace, Reconcilitaion and Tolerance,</i>” delegasi BKSAP DPR RI menuturkan pentingnya menjaga nilai-nilai toleransi, manajemen dan rekonsiliasi konflik demi terciptanya kemitraan global yang stabil dan produktif.</p> <p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI sekaligus Ketua Delegasi, Muhammad Husein Fadlulloh, dalam pidatonya pada <i>1st Plenary Session</i> yang membahas <i>Advancing the Global Architecture of Peace, Peacebuilding, Reconciliation and Tolerance: Synergy of Goverments, Parliaments and Civil Society</i> menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana tertuang dalam konstutusi negara dan orientasi politik luar negeri Indonesia. Lebih jauh, Husein mengingatkan bahwa parlemen memainkan peran penting dalam reformasi kelembagaan, memfasilitasi dan mendukung pembentukan komisi kebenaran, mengumpulkan orang-orang dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda seinklusif mungkin, dan memfasilitasi dialog yang membangun nilai-nilai toleransi.</p> <p>Sebagai penutup, Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini juga berbgai best practice Indonesia dalam rekonsiliasi konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Undang-undang konflik yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk melaksanakan perjanjian damai antara Indonesia dan bekas Gerakan Aceh Merdeka, Undang-Undang tentang Manajemen Konflik Sosial, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang tentang Hubungan Internasional, telah diterapkan dandiadopsi sebagai bagian dari komitmen parlemen dalam pembangunan perdamaian, rekonsiliasi, dan toleransi.</p>	
9.	KSB - BKSAP	<p><i>Courtesy Call</i> Wakil Ketua BKSAP dan Sekjen DPR RI dengan Duta Besar Yunani untuk Indonesia & Duta Besar</p>	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo (F-PF) bersama Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan kehormatan atau <i>courtesy call</i> dari Duta Besar RI untuk Yunani, Y.M. Bpk. Dr. Bebeb A.K. Nugraha Djundjungan serta Duta Besar Yunani</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Indonesia untuk Yunani dilaksanakan pada 25 November 2024.	<p>untuk Indonesia H.E. Mrs. Stella Bezirtzoglou di Gedung DPR RI, pada Senin (25/11/2024).</p> <p>Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Yunani yang telah terjalin sejak 1949, khususnya melalui kerja sama antarpemerintah. Salah satu fokus diskusi adalah peningkatan kerja sama antarpemerintah, sebagai upaya mempererat hubungan di berbagai sektor.</p> <p>Sebagai simbol persahabatan, Indonesia merencanakan penyerahan patung Rama dan Shinta dari kayu zaitun karya seniman asal Bali. Sementara pada hari ini, Pihak Yunani secara resmi menyerahkan patung yang terbuat dari marmer bersejarah, kepada perwakilan rakyat Indonesia.</p> <p>Pertemuan juga membahas berbagai upaya memperluas kerja sama di sektor ekonomi, budaya, dan pariwisata, termasuk rencana sinergi antara Borobudur dan Acropolis sebagai ikon dunia. Sebelum pertemuan berakhir, Duta Besar Yunani juga sempat menyampaikan adanya rencana kunjungan Perdana Menteri Yunani ke Indonesia dalam waktu dekat.</p>	
10.	KSB - BKSAP	Sosialisasi Diplomasi Parlemen & Ketahanan Gizi dan Pangan dilaksanakan pada 25 November 2024.	Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya penyusunan data <i>baseline</i> sebelum implementasi program makan siang bergizi gratis yang tengah dicanangkan pemerintah. Menurutnya, data <i>baseline</i> berperan penting dalam mengukur efektivitas program secara akurat dan memastikan bahwa tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, dapat tercapai dengan maksimal. Hal ini disampaikan Mardani usai pertemuan dengan sejumlah guru besar di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangkaian acara Diskusi dan Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP bertema “Memperkuat Diplomasi	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Indonesia untuk Ketahanan Pangan dan Gizi”, di Kota Bogor, Senin (25/11/2024).</p> <p>“Program ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi merupakan investasi besar pemerintah pada sumber daya manusia. Untuk keberhasilan program ini, perlu adanya data <i>baseline</i> yang akan menjadi dasar dalam mengukur dampaknya ketika program mulai berjalan,” ujar Mardani.</p> <p>Lebih lanjut, Mardani menjelaskan bahwa program makan siang bergizi tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan target menjangkau 81 juta penduduk Indonesia, program ini disebut sebagai proyek super raksasa dengan anggaran fantastis mencapai Rp450 triliun.</p> <p>“Jumlah penduduk yang akan menerima manfaat ini hampir dua setengah kali lipat dari total penduduk Malaysia atau Singapura. Untuk itu, pendekatan berbasis riset dan data yang akurat menjadi kunci sukses program sebesar ini,” tegasnya.</p> <p>Sebagai <i>second track diplomacy</i>, BKSAP DPR RI juga mendukung langkah pemerintah dalam mendorong diplomasi pangan dan gizi secara global. Mardani berharap program ini mampu menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam membangun ketahanan pangan, kesehatan, dan gizi yang akan memperkuat daya saing bangsa di masa depan.</p>	
11.	KSB – BKSAP	Rapim ke-3 BKSAP DPR RI dilaksanakan pada 28 November 2024.	Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) memimpin Rapim ke-3 BKSAP DPR RI pada hari Kamis (28/11/2024) di Gd. Nus III Lt. 6. Rapim ke-3 BKSAP DPR RI membahas rencana partisipasi BKSAP dalam beberapa sidang regional, internasional, persiapan penyelenggaraan sidang PUIK ke-19 dan pembentukan GKSB periode 2024-2029 pada tahun 2025.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Turut hadir secara fisik dalam Rapim BKSAP ke-3 jajaran Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Ravindra Airlangga (F-PG) dan secara virtual, Irine Yusiana Roba Putri (F-PDIP), Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra) dan Bramantyo Suwondo (F-PD) serta para pejabat Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional.</p>	
12.	KSB – BKSAP	<p>Pertemuan Pimpinan BKSAP DPR RI dan KWP dilaksanakan pada 28 November 2024.</p>	<p>Ketua BKSAP DPR RI mengundang tim media yang meliput di lingkungan DPR/MPR RI.</p> <p>Setelah memperkenalkan susunan pimpinan di BKSAP DPR RI, Bang Mardani juga menjelaskan agenda kegiatan ke depan pasca rapat pimpinan yang dilakukan sesaat sebelum pertemuan dengan wartawan ini. “Kami baru saja membahas tentang launching GKSB untuk periode ini dengan mempertimbangkan keamanan dan perdamaian sebagai bagian langkah BKSAP sebagai “<i>second track diplomacy</i>.”</p> <p>“Yang membanggakan bahwa kami diberikan keistimewaan oleh negara-negara lain. Bahkan 21 negara Eropa meminta keluangan waktu kita, kapanpun, untuk bisa bertemu.” Ujar Ketua BKSAP menambahkan.</p> <p>Temu dengan Wartawan ini juga dihadiri oleh Bapak Ravindra dengan menekankan bahwa BKSAP butuh media sebagai bagian penyebaran informasi kebaikan dan kebijakan lembaga. “Bahkan saya punya rekan media untuk mendapatkan masukan atas kebijakan atau opini yang akan dibuat.” Ujar aleg partai Golkar ini.</p> <p>Acara yang direncanakan akan dilaksanakan secara rutin ini diharapkan menjadikan BKSAP sebagai lembaga yang dekat dan ramah media, sehingga nilai-nilai kebijakan BKSAP dapat mendunia.</p>	
13.	KSR - BKSAP	<p><i>PCAsia Seminar on Women, Peace and Security for Women</i></p>	<p>Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo (F-PD) bersama Anggota BKSAP, Trinovi Khairani (F-PG) dan Eva Monalisa (F-PKB) menghadiri <i>Seminar on Women, Peace and Security for Women</i></p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p><i>Parliamentarians</i> dilaksanakan pada 28-29 November 2024.</p>	<p><i>Parliamentarians: Techniques and Methodology for Parliamentary Mediation and Negotiation</i> tanggal 28-29 November 2024 di Phnom Penh, Kamboja.</p> <p>Kegiatan diselenggarakan oleh Kaukus Anggota Parlemen Perempuan <i>National Assembly of Cambodia</i> bekerja sama dengan <i>Parliamentary Centre of Asia (PCAsia)</i> dan <i>German International Peace Operations (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze-ZIF)</i> dan dihadiri oleh para Anggota Parlemen dari 6 (enam) negara ASEAN, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines dan Thailand.</p> <p>Dalam seminar tersebut, delegasi BKSAP berbagi pengalaman mengenai implementasi isu perempuan, perdamaian dan keamanan di level nasional yang termanifestasi dalam Rencana Aksi Nasional (<i>National Action Plan-NAP</i>) tahun 2014 dan NAP Periode 2020-2025.</p> <p>Delegasi Indonesia menjelaskan dalam forum, NAP pertama Indonesia tahun 2014 menekankan pada perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak selama konflik sosial. Termasuk pilar pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan, serta partisipasi perempuan dan anak-anak.</p> <p>NAP Kedua untuk Periode 2020-2025 memprioritaskan pada kemunculan isu-isu keamanan non tradisional di Indonesia, seperti pencegahan ekstrimisme kekerasan, radikalisasi dan kekerasan, perselisihan lahan, dan penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian secara daring.</p> <p>Indonesia juga membagikan pengalamannya yang telah melokalisasi dan mengharmonisasi agenda WPS agenda dengan menerapkan Rencana Aksi Nasional mengenai Pencegahan dan Penanggulangan</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Periode 2020-2024 yang diadopsi di tahun 2021.</p> <p>Dalam seminar, Delegasi mempraktikkan penyusunan <i>National Action Plan</i> yang mengacu pada kerangka global resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.</p>	
14.	KSI - BKSAP	<p>Menghadiri Sidang <i>Regional Conference for Parliaments of the Asia-Pacific Region on Global Health Security</i> di Bangkok, Thailand dilaksanakan pada 2-3 Desember 2024.</p>	<p>Delegasi BKSAP DPR RI berpartisipasi dalam <i>Regional Conference for Parliaments of the Asia-Pacific Region on Global Health Security</i> yang diselenggarakan pada 2-3 Desember 2024 di Bangkok, Thailand. Sidang internasional yang diselenggarakan oleh Parlemen Thailand bekerja sama dengan <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) ini membahas tentang tantangan kesehatan yang dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik pasca Pandemi Covid-19 dan bagaimana parlemen dapat berperan aktif dalam menjawab tantangan ini. Turut hadir dalam sidang ini adalah Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga dan Muhammad Husein Fadlulloh, dan Anggota BKSAP DPR RI, Gde Sumarjaya Linngih, Mohamad Suhibil Iman, dan Verrell Bramasta.</p> <p>Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera sebagai salah satu narasumber dalam sesi panel yang bertema “<i>Leveraging parliamentary functions for health security preparedness</i>” menyatakan bahwa pandemi yang berlangsung 2 tahun (2020-2022) telah mengguncang sendi-sendi sektor kesehatan dan juga ekonomi di berbagai negara. Tidak ada satu pun negara yang dapat menghadapi pandemi sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi antar negara dinilai sangat diperlukan. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga juga menyampaikan dukungan terhadap amandemen terbaru dari <i>International Health Regulations</i>. DPR RI juga siap mendukung</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengimplementasian regulasi ini ke dalam kebijakan nasional.</p> <p>Selain itu, ia menegaskan perlunya kolaborasi antar negara di Kawasan Asia Pasifik untuk tercapainya masyarakat yang resilien. Ia menambahkan bahwa Indonesia siap menjadi pusat mengembangkan vaksin berbasis MRNA bagi kawasan ini dan untuk mendukung kebijakan nasional dan internasional untuk pencegahan, kesiapan dan respon dalam menghadapi pandemi di kemudian hari.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Polres Depok	Kunjungan Kerja MKD Ke dilaksanakan pada 13-15 November 2024.	Tentang Pelaksanaan Fungsi, tugas dan wewenang MKD DPR RI, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Pilkada Damai.	
2.		Paket Meeting di Griya Sabha, Kopo dilaksanakan pada 18-20 November 2024.	Tema: "Paradigma Etik Wakil Rakyat: Manusia Setengah Dewa"	
3.	Polres Bogor	Kunjungan Kerja MKD dilaksanakan pada 21-23 November 2024.	Tentang Pelaksanaan Fungsi, tugas dan wewenang MKD DPR RI, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Pilkada Damai.	
4.	DPRD Jawa Barat	Menerima Audiensi dilaksanakan pada 26 November 2024.		
5.	Polres Tangerang Selatan	Kunjungan Kerja MKD dilaksanakan pada 28-30 November 2024.	Tentang Pelaksanaan Fungsi, tugas dan wewenang MKD DPR RI, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Pilkada Damai.	
6.		Paket Meeting di Wisma DPR RI dilaksanakan pada 1-3 Desember 2024.	Tema: "Implementasi Etika Konstitusi Dalam Etika Parlemen".	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.		Rapat Verifikasi dilaksanakan pada 2 Desember 2024.		
8.		Rapat Penyelidikan dan Verifikasi dilaksanakan pada 3 Desember 2024.		
9.	DPRD Jawa Barat	Menerima Audiensi dilaksanakan pada 26 November 2024.		
10.	Polres Tangerang Selatan	Kunjungan Kerja MKD dilaksanakan pada 28-30 November 2024.	Tentang Pelaksanaan Fungsi, tugas dan wewenang MKD DPR RI, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Pilkada Damai.	
11.		Paket Meeting di Wisma DPR RI dilaksanakan pada 1-3 Desember 2024.	Tema: "Implementasi Etika Konstitusi Dalam Etika Parlemen".	
12.		Rapat Verifikasi dilaksanakan pada 2 Desember 2024.		
13.		Rapat Penyelidikan dan Verifikasi dilaksanakan pada 3 Desember 2024.		
14.		Rapat Intern dilaksanakan pada 4 Desember 2024.	Membahas Pengaduan dan Surat-surat Masuk.	
15.	DPRD Kab. Bulukumba	Menerima audiensi 4 Desember 2024.	Konsultasi terkait tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
16.	DPRD Kab. Cianjur	Menerima audiensi dilaksanakan pada 5 Desember 2024.	Mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD.	
17.	DPRD Provinsi Jawa Timur	Menerima audiensi dilaksanakan pada 5 Desember 2024.	Kunjungan kerja dalam rangka <i>sharing</i> terkait Kode Etik dan Tata Beracara.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	PT. Asuransi Jasindo	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 13-15 November 2024 ke Bekasi, Jawa Barat.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan keluarganya bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	--
2.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka keprotokolan bandara: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal 20-22 November 2024 ke Jawa Timur. 	Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di Bandara Makassar untuk:	

NO	PIHAK	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Tanggal 23-25 November 2024 ke Bali. c. Tanggal 28-30 November 2024 ke Yogyakarta. d. Tanggal 1-3 Desember 2024 ke Jawa Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana di bandara agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar. 	
3.	Setjen DPR RI	<p>Rapat BURT dilaksanakan pada Rabu, 4 Desember 2024</p> <p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan III Tahun 2024 Satker Dewan. b. Laporan Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan III Tahun 2024 Satker Setjen. c. Pembentukan Panja-panja: <ul style="list-style-type: none"> 1) Perubahan AKUPA DPR RI Tahun 2025. 2) Penyusunan AKUPA DPR RI Tahun 2026. 3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2025-2029. 		

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP)	Kunjungan Kerja ke Serang, Banten dilaksanakan pada 15 – 17 November 2024.	<p>temuan dengan kementerian Pertanian ke BSPI Banten dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Susanto, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Fuadi, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian; 3. Ismatul Hidayah, Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten. <p>Beberapa kesimpulan hasil Kunjungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pertanian diharapkan dapat mengembangkan penerimaan PNBP agar nantinya tidak hanya menjadi penerimaan rutin akan tetapi bisa lebih inovatif dan kreatif. Perkembangan atas pemasukan PNBP pada satker-satker Kementerian Pertanian masih dapat dimaksimalkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan Balai seperti BPSIP Banten bisa lebih dimaksimalkan memberikan inovasi kepada Petani seperti inovasi alat pertanian dan metode pertanian yang modern. ▪ BAKN nantinya akan terus melakukan pengawasan dalam pengelolaan PNBP salah satunya dari Kementerian Pertanian. PNBP ini nantinya diharapkan dapat kembali lagi kepada masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan petani. ▪ Terkait dengan Opini WDP pada Kementerian Pertanian tahun 2023, BAKN akan terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam upaya memperbaiki tata kelolanya agar Opini di tahun berikutnya dapat kembali WTP. ▪ Terkait dengan kegiatan impor produk pertanian dan peternakan yang banyak merugikan masyarakat Indonesia khususnya petani dan peternak, BAKN DPR RI mengharapkan agar Kementerian Pertanian dapat lebih peduli dan tanggap terhadap tersebut. Kementerian Pertanian dapat melakukan langkah-langkah seperti pembatasan kuota impor dan memberlakukan tarif impor pada setiap izin impor yang dikeluarkan. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ BAKN DPR RI berhadap bahwa Kementerian Pertanian lebih memperhatikan perkembangan balai-balai dibawah UPT Kementerian Pertanian agar lebih berkembang dan melakukan inovasi (teknologi alat-alat pertanian) untuk mendorong kemajuan petani di Indonesia. 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, di Bandung – Jawa Barat • Balai Inseminasi Buatan (BIB) 	Kunjungan Kerja ke Lembang, Jawa Barat dilaksanakan pada 15 – 17 November 2024.	<p>Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, di Bandung – Jawa Barat dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh. Makmun, M.Sc. 2. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, drh. Pujo Harmadi, MP 3. Kepala Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Gun Gun Gunara, S.Pt., MP. <p>Kesimpulan hasil kunjungan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI Nomor 21.b/LHP/XVII/05/2024, Beberapa permasalahan seperti pengelolaan PNBPN, belanja barang, dan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan, telah diatasi dengan langkah-langkah konkret seperti penyetoran kembali ke kas negara dan perbaikan prosedur internal. - BAKN DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK RI, khususnya melakukan pembenahan pelaksanaan belanja sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas. - Kementerian Pertanian berfokus pada: <ol style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, optimalisasi pembayaran non-tunai, dan penguatan budaya tertib SPJ untuk mencegah permasalahan yang sama di masa depan b) Memperoleh opini WTP dengan komitmen terhadap akuntabilitas keuangan, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi penggunaan sistem informasi - BAKN DPR RI mendorong penyusunan kebijakan terkait aset dan pendanaan serta percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK agar menjadi prioritas untuk 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>memperbaiki laporan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAKN DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan tambahan anggaran guna meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan PNBP yang lebih optimal - Pengelolaan PNBP yang berasal dari aset BMN perlu diatur agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan kembali untuk optimalisasi kegiatan, mengingat saat ini anggaran tersebut terkendala pada sumber daya yang terbatas. 	
3.	PT Timah Tbk Kepulauan Bangka Belitung	Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada 30 November s.d. 2 Desember 2024.	<p>Pertemuan dengan PT Timah Tbk dihadiri oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ir Ahmad Dani Virsal, MBA, Direktur Utama PT Timah Tbk - Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., C.E.H. Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk. <p>Kesimpulan hasil kunjungan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor yang memengaruhi kontribusi PNBP di PT Timah Tbk dipengaruhi oleh masing-masing komponen PNBP, seperti dividen negara dipengaruhi oleh nilai laba Perusahaan dan besaran/persentase dividen yang dibagikan, iuran Tetap (pertambangan) dipengaruhi oleh luas IUP, iuran Produksi (<i>Royalty</i>) dipengaruhi oleh harga jual dan volume penjualan, iuran hasil hutan dipengaruhi oleh pemanfaatan hutan produksi, dan iuran bawah tanah dipengaruhi oleh pemanfaatan air bawah tanah - BAKN mendorong untuk dilakukan perbaikan SOP dalam tata kelola niaga dari hulu hingga hilir di PT Timah Tbk untuk menghindari kejadian hukum tidak terulang di masa yang akan datang. Terhadap SOP yang sudah ada, harus dilakukan review secara terus menerus sampai ditemukan SOP terbaik - BAKN mendorong ke PT Timah Tbk untuk mereformasi bagian hukum di PT Timah Tbk. Mengingat kasus hukum yang masih dalam penanganan Aparat Penegak Hukum saat ini merupakan bagian dari kelalaian bagian hukum 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - BAKN memndorong PT Timah Tbk untuk melakukan terobosan dalam pengelolaan tata niaga di PT Timah Tbk untuk menyelamatkan sumber daya dan aset negara Republik Indonesia 	
4.	PT Bukit Asam Tbk Sumatera Selatan	Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan 30 November s.d. 2 Desember 2024.	<p>Pertemuan dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Farida Thamrin; 2. Direktur Operasi dan Produksi, Suhedi; 3. Direktur Sumber Daya Manusia, Suherman; 4. Sekretaris Perusahaan, Niko Chandra; 5. GM Unit Dermaga Kertapati, Ichsan Aprideni; 6. VP Satuan Pengawasan Intern, Nugraha Nurtyasanta; dan 7. VP Anggaran & Akuntansi, Putri Indah Larasatie. <p>Kesimpulan hasil kunjungan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAKN DPR RI mendorong PT Bukit Asam Tbk untuk terus melakukan inovasi guna mengembangkan sistem yang lebih efektif dan efisien, khususnya penggunaan digitalisasi dalam proses bisnisnya - BAKN DPR RI meminta PT Bukit Asam Tbk untuk melakukan perhitungan untuk membandingkan <i>opportunity cost</i> antara <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) saat ini dengan DMO 25% - BAKN DPR RI mendorong PT Bukit Asam Tbk sebagai supplier batubara terbesar untuk PT PLN guna membantu pemerintah dalam hal melakukan penghematan atas Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik - BAKN DPR RI meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Bukit Asam Tbk terkait peningkatan produksi yang tidak berbanding lurus dengan laba, biaya-biaya apa saja yang menyebabkan produksi terus meningkat namun laba justru mengalami penurunan, serta perbaikan apa yang dapat dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Kunciran – Cengkareng Banten (PT JKC)	Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke Provinsi Banten dilaksanakan 4 Desember 2024.	<p>Pertemuan dihadiri oleh Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Sdr. Subakti Syukur, beserta jajaran.</p> <p>Kesimpulan hasil kunjungan antara lain sebagai berikut: Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2020 s.d. 2022, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam semua hal yang material.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Penetapan Pimpinan	Diadakan oleh BAMUS dilaksanakan pada 22 Oktober 2024.	<p>Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menetapkan pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Sebelumnya, BAM merupakan badan baru yang dibentuk DPR RI Periode 2024-2029 dan ditetapkan pembentukannya pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 tanggal 15 Oktober 2024.</p> <p>Susunan pimpinan BAM diantaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua BAM DPR RI: Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (F-PKS); • Wakil Ketua BAM DPR RI : <ul style="list-style-type: none"> • ADIAN Y.Y. NAPITUPULU, S.H. (F-PDIP); • Dr.Tr. AGUN GUNANDJAR S, Bc.I.P., M.Si. (F-PG); • Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH, M.A.P. (F-PKB); dan • dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA, M.H.Kes. (F-PD). 	
2.	DPRD Kota Salatiga	Audiensi dengan DPRD Kota Salatiga terkait kinerja dan anggaran DPRD Pasca Putusan MA terkait Perpres 53 Tahun 2023 dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.	<p>Beberapa hal yang disampaikan oleh DPRD Kota Salatiga antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya Putusan MA terkait Perpres No.53 Tahun 2003 yang merubah pola pembayaran perjalanan dinas DPRD Provinsi/Kabupaten yang semula lumpsum menjadi <i>at cost</i>. DPRD Kota Salatiga berharap agar DPR RI dapat memberikan perhatian karena dinilai cukup membebani DPRD Provinsi Kabupaten/Kota. 2. Terkait dengan adanya Badan baru, BAM DPR RI, DPRD Kota Salatiga menyoroti pentingnya mekanisme penyampaian aspirasi secara langsung dari masyarakat ke DPRD, selain melalui kegiatan reses. BAM dianggap sebagai 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>solusi strategis, mengingat reses hanya dilakukan secara berkala. Diharapkan BAM dapat diterapkan sampai tingkat DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna mempermudah penyerapan aspirasi masyarakat secara terus menerus.</p> <p>Beberapa hal yang disampaikan oleh BAM antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR RI dalam Rapat Paripurna memiliki tugas dan fungsi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. - Menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat. - Menyampaikan hasil penelaahan kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti. - Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh AKD. - Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD terkait. - Menerima aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan <i>meaningful participation</i> pada setiap tahapan pembahasan RUU. 2. Aspirasi terkait Perpres 53 Tahun 2023 dan regulasi terkait penerapan BAM di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota akan disampaikan kepada Pimpinan BAM DPR RI untuk kemudian diteruskan ke Komisi II DPR RI untuk dikaji lebih lanjut dan dikomunikasikan dengan pihak pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri. 	
3.	Kepala BK DPR RI	RDP membahas Membicarakan Tugas Fungsi BAM dilaksanakan pada 28 Oktober 2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI meminta Badan Keahlian DPR RI untuk membuat <i>draft</i> Rancangan Tata Tertib DPR RI berdasarkan rapat hari ini yang mengatur antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penegasan mengenai tugas, fungsi, dan kedudukan BAM DPR RI. b. Penegasan kewenangan BAM DPR RI dalam memutuskan hasil rapat dari pembahasan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. c. Mekanisme verifikasi aspirasi yang masuk ke BAM DPR RI. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. BAM DPR RI meminta Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan studi komparasi dengan badan yang sejenis dengan BAM di negara lain.</p>	
4.	Badan Keahlian Setjen DPR RI	RDP dalam rangka Membicarakan tindak lanjut tugas, fungsi dan kewenangan BAM DPR RI dilaksanakan pada 5 November 2024.	<p>A. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan substansi Pasal 88 Rancangan Tata Tertib DPR RI telah disepakati sebelumnya dalam Rapat Paripurna, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 89 Rancangan Tata Tertib DPR RI, yang pada intinya BAM melakukan monitoring atas tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh AKD dan BAM dapat melakukan tindak lanjut laporan masyarakat yang bersifat umum dan tidak mengurangi kewenangan AKD. 2. Hasil studi komparasi menyimpulkan terdapat wadah penerimaan aspirasi masyarakat di negara lain yang sejenis dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI yaitu di negara Jerman dan Peru. <p>B. Pimpinan dan Anggota BAM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan kewenangan BAM dalam Rancangan Tata Tertib DPR RI terlalu luas (tidak tak terbatas), yang akan menyulitkan pelaksanaan kinerja BAM, sehingga butuh pembatasan tugas dan kewenangan BAM. 2. Terdapat kerancuan dalam pengaturan tugas dan kewenangan BAM dalam Rancangan Tata Tertib DPR RI, seolah-olah BAM hanya menjadi wadah pengaduan, namun tidak terdapat solusi konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. BAM harus dapat memberikan solusi konkret atas pengaduan masyarakat yang diterima. 3. Tugas dan kewenangan yang tercantum dalam Rancangan Tata Tertib DPR RI tidak sesuai dengan semangat pembentukan BAM, hal tersebut sama halnya dengan fungsi dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. 4. Ketentuan mengenai BAM di dalam Rancangan Tata Tertib DPR RI harus mengakomodir: 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan dalam tugas dan kewenangan BAM, terutama dalam hal fungsi BAM untuk mengkomunikasikan segala urusan penanganan pengaduan masyarakat di DPR RI. b. Kewenangan BAM yang dapat memanggil pihak terkait di dalam pengaduan masyarakat, dengan atas izin Pimpinan DPR RI. c. Kewenangan BAM untuk dapat “memutus” atau memberikan rekomendasi atas penyelesaian permasalahan pengaduan masyarakat. d. Penguatan teknis perihal pelaksanaan tugas dan kewenangan BAM. <p>5. BAM akan melakukan rapat dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan AKD untuk berkoordinasi perihal tugas dan kewenangan BAM agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan AKD.</p>	
5.	Majelis Rakyat Papua	RDPU dalam rangka Mendengarkan aspirasi dari Majelis Rakyat Papua dilaksanakan pada 20 November 2024.	<p>A. Majelis Rakyat Papua (MRP):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas dan wewenang untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. 2. Untuk menjalankan fungsi serta sebagai wujud dari Otonomi Khusus Papua, MRP membentuk Pansus Gubernur, Pansus Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, serta Pansus Afiriasi yang menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat. 3. Afiriasi pada Otonomi Khusus Papua sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan mengedepankan ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu NKRI menjadi bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Papua. Oleh karena itu, Majelis Rakyat Papua harus mengawal jalannya Otonomi Khusus Papua sampai pada masa keemasan pada tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam pelaksanaan afirmasi tersebut, Majelis Rakyat Papua ingin memastikan adanya kebijakan khusus dari pemangku kepentingan tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Papua yang dapat mengutamakan Orang Asli Papua. 5. MRP Sangat mengharapkan agar diutamakannya orang asli Papua dalam penerimaan pekerjaan, baik ASN, TNI, Polri, BUMN maupun sektor swasta agar masyarakat asli Papua dimudahkan menjadi karyawan pada sektor-sektor tersebut. 6. MRP juga memohon dukungan agar Masyarakat Papua dapat dikhususkan dalam penerimaan Calon Pendidikan Kedinasan, seperti STPDN, Sekolah BIN, STAN, dan lainnya. 7. MRP memohon beberapa nama agar dapat mengisi jabatan tertentu di Pemerintahan, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Anthonius Ayorbaba sebagai Tenaga Ahli atau Direktur Jenderal Kemenkumham RI karena memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi sebagai Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua Barat dan Provinsi Papua. b. Bapak Wempi Romandey sebagai Pangdam TNI, karena merupakan Orang Asli Papua di TNI. 	
